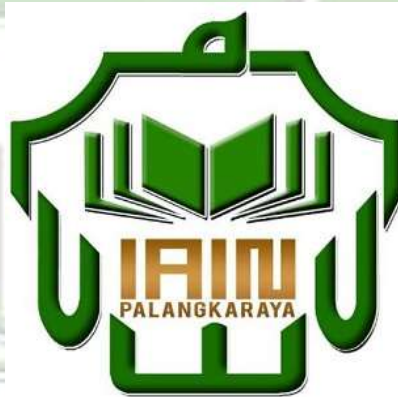


**PENYELESAIAN KERUGIAN AKIBAT
PENUNDAAN PEMBAYARAN BARANG PESANAN
PADA INDUSTRI MEUBEL DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

YUDI YANOR

NIM. 160 213 0071

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : “PENYELESAIAN KERUGIAN AKIBAT
PENUNDAAN PEMBAYARAN BARANG
PESANAN PADA INDUSTRI MEUBEL DI KOTA
PALANGKA RAYA”**

NAMA : YUDI YANOR

NIM : 160 213 0071

FAKULTAS : SYARI’AH

JURUSAN : SYARI’AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 16 Oktober 2020

Menyetujui :

Pembimbing I



DRS. SURYA SUKTI, M.A.

NIP.196505161994021002

Pembimbing II



MUNIB, M.A.G.

NIP.196009071990031002

Wakil Dekan Bidang Akademik



DRS. SURYA SUKTI, M.A.

NIP.196505161994021002

Ketua Jurusan Syari’ah



MUNIB, M.A.G.

NIP.196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Yudi Yanor

Palangka Raya, 16 Oktober 2020

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : **YUDI YANOR**

NIM : **160 213 0071**

JUDUL : **"PENYELESAIAN KERUGIAN AKIBAT
PENUNDAAN PEMBAYARAN BARANG PESANAN
PADA INDUSTRI MEUBEL DI KOTA PALANGKA
RAYA**


Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


DRS. SURYA SUKTI, M.A.
NIP.196505161994021002


MUNIB, M.A.G.
NIP.196009071990031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PENYELESIAN KERUGIAN AKIBAT PENUNDAAN PEMBAYARAN BARANG PESANAN PADA INDUSTRI MEUBEL DI KOTA PALANGKA RAYA”**, NIM 1602130071 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya Pada :

Hari : Jum’at

Tanggal : 23 Oktober 2020 M

6 Rabiul Awal 1442 H

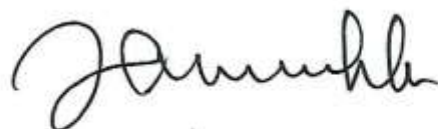
Palangka Raya, 23 Oktober 2020

Tim Penguji :

1. Norwili, M.H.I
Ketua Sidang/ Penguji
2. Hi. Tri Hidavati, M.H
Penguji I
3. Drs. Surya Sukti, M.A
Penguji II
4. Munib, M.Ag
Sekretaris Sidang/Penguji

()
()
()
()

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

PENYELESAIAN KERUGIAN AKIBAT PENUNDAAN PEMBAYARAN BARANG PESANAN PADA INDUSTRI MEUBEL DI KOTA PALANGKA RAYA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya. Fokus penelitian ini adalah (1) Mengapa terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya?. (2) Apa saja kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya?. (3) Bagaimana penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI?. Subjek penelitian ini adalah pemilik usaha dan pembeli dari meubel Ananda, meubel Meyda, meubel Nadia dan meubel Riadi. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan dikarenakan adanya 2 (dua) yaitu wanprestasi dan *force majeure*. (2) Kerugian yang didapat penjual akibat penundaan pembayaran barang pesanan, yaitu kerugian modal atau bahan baku dan kerugian waktu karena harus membuat dan menyelesaikan barang pesanan tersebut. (3) Penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, pertama pembatalan sepihak dan tanggung resiko. Kedua, *Rescheduling* (penjadwalan ulang) atau *iqalah* (Pembatalan atas kerelaan kedua belah pihak). Penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan penyelesaian menurut KHES dan fatwa DSN MUI No.6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*.

Kata kunci: Penyelesaian, Penundaan Pembayaran, *Istishna*, KHES, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

SETTLEMENT OF LOSSES DUE TO DELAY OF PAYMENT OF ORDER GOODS IN THE FURNITURE INDUSTRY IN PALANGKA RAYA CITY

This research is motivated by the frequent delays in payment of ordered goods in the furniture industry in Palangka Raya City. The focus of this research is (1) Why is there a delay in the payment of ordered goods in the furniture industry in Palangka Raya City ?. (2) What are the losses due to delays in payment of ordered goods at the furniture industry in Palangka Raya City? (3) How is the settlement of losses due to delays in payment of ordered goods at the furniture industry in Palangka Raya City with the perspective of Compilation of Sharia Economic Law and Fatwas of the MUI National Sharia Council? The subjects of this research are business owners and buyers of Ananda furniture, Meyda furniture, Nadia furniture and Riadi furniture. The research data were collected using the method of observation, interviews and documentation, and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study indicate that: (1) The cause of delays in payment of ordered goods is due to 2 (two), *wanprestasi* and *force majeure*. (2) Losses incurred by the seller due to delays in payment of ordered goods, namely loss of capital or raw materials and loss of time due to having to make and complete the ordered goods. (3) Settlement of losses due to postponement of payment of ordered goods at the furniture industry in Palangka Raya City is divided into 2 (two), namely, first, unilateral cancellation and risk responsibility. Second, Rescheduling (rescheduling) or *iqalah* (Cancellation at the willingness of both parties). Settlement of losses due to delays in payment of ordered goods at the furniture industry in Palangka Raya City is in accordance with the settlement according to the KHES and the DSN MUI fatwa No.6/DSN-MUI/IV/2000 regarding the sale and purchase of *Istishna*.

Keywords: Settlement, Payment Delay, *Istishna* ', KHES, Fatwa DSN MUI.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel Di Kota Palangka Raya ini, *Alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, kerabat, sahabat, pengikut hingga umat beliau sampai akhir zaman. *Āmīn*.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sahri dan ibunda Norsiah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya untuk belajar dan terus belajar serta adik saya Desi Ananda yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam kehidupan sehari-hari peneliti. Serta seluruh keluarga besar peneliti yang selalu memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan rasa semangat yang tidak ada henti-hentinya untuk

peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua. *Āmīn*.

2. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang selama ini selalu memberikan motivasi, arahan maupun masukan selama proses perkuliahan dan juga selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. *Āmīn*.
5. Yth. Bapak Munib, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga Bapak beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan serta keberkahan dalam menjalani kehidupan. *Āmīn*.
6. Laili Wahyunita, S. Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu memberikan motivasi kepada kami mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga beliau beserta keluarga besar selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. *Āmīn*.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua. *Āmīn*.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. *Āmīn*.

Palangka Raya, Oktober 2020

Penulis,

YUDI YANOR

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudi Yanor

NIM : 160 213 0071

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 Juli 1998

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KERUGIAN AKIBAT PENUNDAAN PEMBAYARAN BARANG PESANAN PADA INDUSTRI MEUBEL DI KOTA PALANGKA RAYA”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti terdapat pelanggaran, maka peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 23 Oktober 2020



Yudi Yanor
NIM. 160 213 0071

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(Q.S An-Nisa [4] : 29)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



PERSEMBAHAN



Ku persembahkan karya sederhana ku ini kepada :

Ayahku Sahri dan ibuku Norsiah

Yang tersayang yang tak pernah lelah untuk bersabar dan berdo'a demi kesuksesan anaknya.

Adikku Desi Ananda

Yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat yang luar biasa untuk peneliti.

Noriyana Wulandari

Terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik, berkat itu aku berhasil mengatasi semua tantangan ini. Dan sekarang memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Sahabat-Sahabatku

Fani, Mahdi, Aldi, Janisa dan Nurul

Terima Kasih untuk sahabat yang selalu ada disisiku. Bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya memiliki kalian dalam hidupku.

Seluruh **Dosen Fakultas Syariah** yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.

Seluruh kawan-kawan seperjuangan khususnya kawan-kawan **HES angkatan tahun 2016** semuanya yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga peneliti semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua mahasiswa HES angkatan tahun 2016 kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

Almamaterku IAIN Palangka Raya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
---	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf f “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoritik	12
C. Kerangka Konseptual	17
1. Jual Beli Pesanan (<i>Istishna'</i>)	17
2. Penundaan Pembayaran	37
3. Wanprestasi dan Penyelesaiannya	52
D. Kerangka Pikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	65
1. Waktu Penelitian	65
2. Tempat Penelitian	66
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
1. Jenis Penelitian	66

2. Pendekatan Penelitian.....	67
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
1. Wawancara	69
2. Observasi.....	71
3. Dokumentasi	72
E. Pengabsahan Data	73
F. Analisis Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	77
B. Penyajian Data.....	90
C. Analisis.....	123
1. Penyebab Terjadi Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya	123
2. Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya	130
3. Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	135
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	150
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku.....	153
B. Skripsi, Jurnal dan Tesis	155
C. Wawancara dan Observasi.....	156
D. Peraturan dan Undang-Undang.....	156
E. E-book.....	157
F. Internet	157
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN



cet.	: cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: IAIN Palangka Raya
Ibid	: Ibidem
M	: Masehi
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: Shallallahu 'alaihi wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
Vol.	: Volume
Terj.	: Terjemahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dimuka bumi ini dalam menjalani kehidupannya tidak akan bisa hanya dengan seorang diri, mereka pasti memerlukan manusia yang lainnya untuk menjalani kehidupan ini. Dan manusia sebagai makhluk hidup pun memiliki kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kehidupannya, mulai dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Yang dimaksud dari kebutuhan itu ialah keinginan manusia terhadap suatu barang maupun jasa yang dapat memenuhi kepuasan jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkan dapat diperoleh melalui jual beli. Ada banyak cara melakukan pembayaran didalam jual beli seperti dengan cara bayar dimuka (*Al-Bai' al-hal*), bayar secara bertahap/dicicil (*Al-Bai' bi al-taqsith*) ataupun dengan bayar dibelakang (*Al-Bai' al-mu'ajjal*) tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Dalam jual beli tersebut kadang muncul suatu permasalahan, seperti penundaan pembayaran. Yang dimaksud dengan penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian, yaitu kerugian materil dan immateril bagi pihak penjual. Penundaan pembayaran ialah suatu transaksi yang telah melanggar perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran yang sudah melebihi waktu jatuh tempo yang disepakati bersama.

Dalam Ilmu Fiqh Muamalah yang dapat diketahui ada berbagai macam bentuk jual beli. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem pesanan, atau biasa disebut sebagai jual beli *Istishna'*. Jual beli *Istishna'* ini hampir mirip dengan jual beli *Salam*, Perbedaannya biaya dalam *Salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan biaya dari *Istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat dicicil ataupun dibayar dibelakang, menurut Wahbah Al-Zuhaili perbedaan dari keduanya ialah barang dalam *Istishna'* harus barang yang mesti dibuat atau diproses lebih dulu sedangkan *Salam* tidak. Dalam pemahaman orang awam *Istishna'* bisa disebut sebagai perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang kepada penjual dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga langsung dilunasi dimuka ataupun di belakang sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 Ketentuan pembayaran pada jual beli *Istishna'* adalah alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Di Kota Palangka Raya terdapat banyak usaha masyarakat yang bergerak dibidang pengolahan kayu atau Meubel, yang memiliki omzet cukup besar, berkisar 5 juta sampai dengan 40 juta perbulannya. Seperti Meubel Ananda, Meubel Meyda, Meubel Riadi, Meubel Nadia dan lainnya yang membuat alat-alat kantor maupun rumah tangga seperti lemari, meja, kursi

dan lain-lain. Dalam pelaksanaan jual belinya pun beragam, ada jual beli dalam sistem kontan¹, jual beli dalam sistem *Salam*² maupun jual beli dalam sistem *Istishna*’/Pesanan.

Pelaksanaan jual beli yang barang dengan sistem *Istishna*’/pesanan di Meubel yang ada di Kota Palangka Raya ini, pembeli harus menunggu beberapa hari untuk menerima barangnya sampai penjual menyelesaikan barang pesannya sesuai dengan besar dan kesulitan barang pesannya tersebut. Biasanya pembeli yang melakukan pemesanan lemari, meja, kursi dan lain-lain pada meubel di Kota Palangka Raya melakukan transaksi pemesanan dengan memberikan uang muka pembayaran sebagai tanda jadi kesepakatan, pemberian jumlah uang mukanya pun tergantung kesepakatan kedua belah pihak, biasanya berkisar dari 10% sampai dengan 50% dari jumlah pembelian barang pesanan dan melunasinya pada saat barang itu sudah selesai dan siap dikirim.

Namun didalam proses pembayaran tidak sedikit pembeli yang menunda pelunasan barang pesanan yang sudah selesai tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kesepakatan awal, dengan mengemukakan berbagai alasan seperti lagi mempunyai kebutuhan lain yang sangat mendesak, belum ada uang, pembeli sedang berada diluar kota ataupun dengan sengaja mengulur-ngulur waktu dengan sering berjanji untuk melunasi pembayaran.

Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ini bisa membuat penjual mendapat kerugian, seperti kerugian waktu dan materil

¹*Jual beli kontan* adalah jual beli yang penyerahan barang dan pembayarannya langsung.

²*Jual beli Salam* adalah jual beli yang penyerahan barangnya tertunda tetapi pembayarannya langsung lunas.

karena untuk membuat barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli memakan banyak waktu dan memerlukan modal untuk membeli bahan baku dan juga untuk upah tukang pembuat pesanan tersebut. Dalam hal ini membuat salah satu pihak yaitu penjual merasa dirugikan oleh pembeli.

Jual beli seperti diatas terkadang menimbulkan permasalahan, penjual tidak dapat menghindari pembeli yang bermasalah terkait pembayaran barang pesanan. Dalam setiap penyelesaian permasalahan jual beli, agama Islam menganjurkan untuk selalu diselesaikan dengan cara musyawarah agar kedua belah pihak saling ridho dan tidak ada yang merasa dirugikan. Penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan kedua belah pihak tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bersimpangan dengan prinsip syariah.

Dalam penyelesaian jual beli secara musyawarah akan menghasilkan dua pilihan untuk menyelesaikannya yaitu dengan *addendum* atau dengan *iqalah*. *Addendum* adalah perjanjian tambahan yang ada pada perjanjian pokoknya atau dengan arti lain *addendum* merupakan suatu istilah dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berarti tambahan atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. Menurut Frans Satriyo Wicaksono, dalam buku “Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak” menyebutkan bahwa “jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur

tersebut”.³ Jadi hal ini apabila kedua belah pihak dalam musyawarah sepakat ingin melanjutkan akad jual beli tersebut maka akan dilakukan *addendum*. Sedangkan *iqalah* adalah tindakan para pihak yang berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka buat dan menghapus akibat hukum yang timbul dari kesepakatan jual beli tersebut.⁴

Kondisi permasalahan jual beli seperti hal yang di atas agama Islam sudah menganjurkan penyelesaian secara musyawarah, sebagai salah satu cara untuk menuju kemashlahatan umat. Bagaimanakah penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya, apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam, mengingat Agama Islam selalu menginginkan kesesuaian dalam kesepakatan setiap perjanjian jual beli demi terwujud kemaslahatan umat Islam.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena seperti uraian yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri Meubel yang ada di Kota Palangka Raya. Dengan judul ***”Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel Di Kota Palangka Raya”***.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang menjadi pusat penelitian adalah sebagai berikut.

³ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 5.

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 47.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya?
2. Apa saja kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini (*the goal of the research*) adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengapa terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan yang berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat, khususnya mengenai pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan, serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelesaiannya yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan.

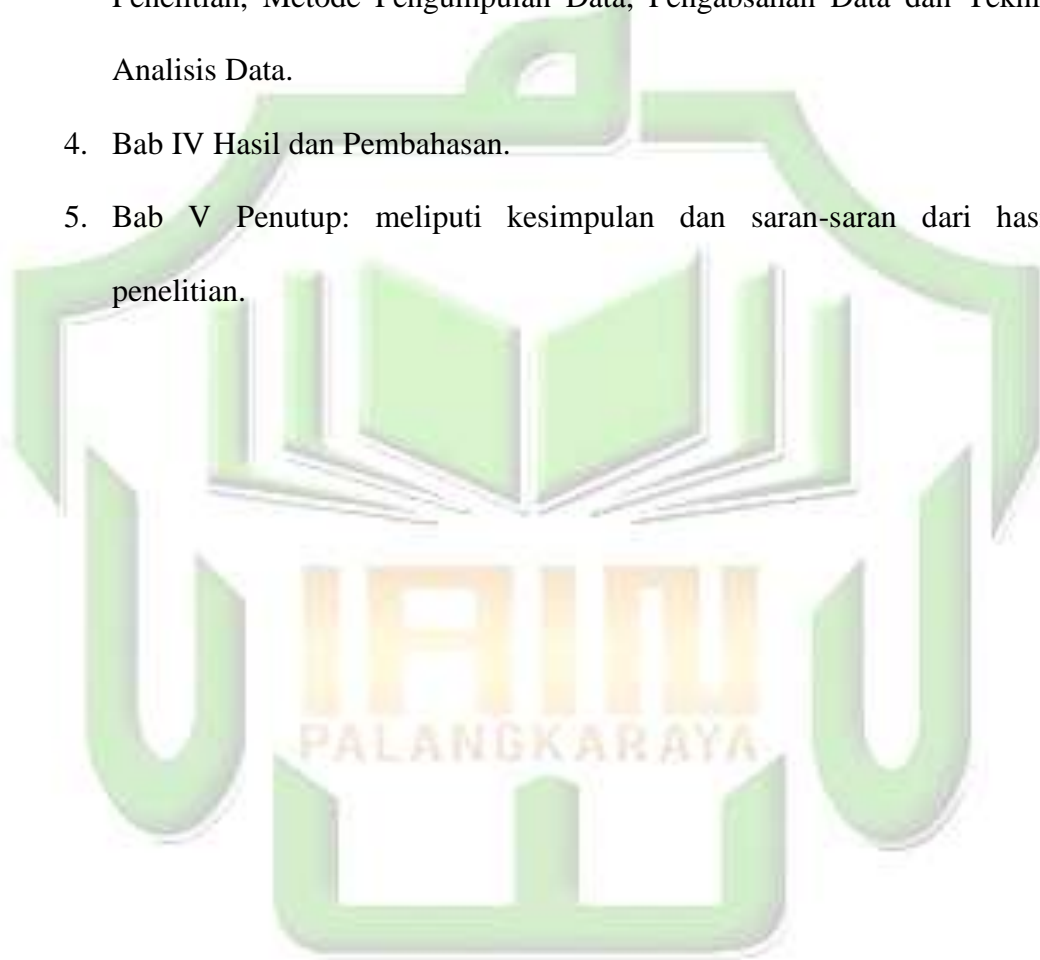
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemilik usaha/penjual, konsumen/pembeli dan masyarakat dalam memahami pandangan hukum Islam tentang penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan.

E. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan: meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II Kajian Teori dan Konsep Penelitian: meliputi Penelitian Terdahulu, Kajian Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.
3. Bab III Metode penelitian: meliputi Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Pengabsahan Data dan Teknik Analisis Data.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan.
5. Bab V Penutup: meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Dwi Sartika tahun 2013, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Pelaksanaan *Bai’ Al-Istishna’ Terhadap Pemesan Teralis Pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) Bagaimana konsep pemesanan *Bai’ al-istishna’*. b) Bagaimana pelaksanaan pemesanan teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu. c) Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *Bai’ al-istishna’* terhadap pemesanan teralis pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu. Penelitian ini terfokus kepada pelaksanaan jual beli *Istishna’* menurut perspektif dari ekonomi Islam. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut adalah:

“Menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang selama ini muncul dan terus berjalan dan tidak adanya kesesuaian akad ataupun rukun dari *Istishna’* yaitu seperti tidak adanya pencatatan perjanjian pemesanan barang, pesanan barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan, keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan dan penundaan pembayaran oleh pembeli, dengan hal ini masih belum sesuai dengan konsep yang ada di ekonomi Islam”.⁵

⁵ Dewi Sartika, ““Pelaksanaan *Bai’ Al-Istishna’ Terhadap Pemesan Teralis Pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

Persamaan penelitian Dwi Sartika dengan penulis terletak pada persoalan jual beli pesanan/*Istishna*. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yakni Dwi Sartika fokus kepada pelaksanaan jual beli *Istishna*’ menurut perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan.

2. Tri Yuliati tahun 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) bagaimana praktik tentang penundaan pembayaran hutang di BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu. b) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo di BMT Sepakat Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini terfokus kepada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut adalah:

“Menunjukkan bahwa penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo menjadi permasalahan yang banyak terjadi, padahal pihak pemberi pinjaman atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat sudah bertindak secara tegas dengan memberikan Surat Peringatan ke-1 dan seterusnya bertujuan agar pihak peminjam dapat membayar dan tidak melebihi batas waktu jatuh tempo. Padahal penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo tidak diperbolehkan dalam Islam karena bertentangan dengan Hadis dan Fatwa Para Ulama”.⁶

⁶ Tri Yuliati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo” (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Persamaan penelitian Tri Yuliati dengan penulis terletak pada persoalan penundaan pembayaran. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Tri Yuliati fokus kepada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah pada penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan.

3. Yulia Safitri tahun 2019, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec.Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara”*. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: a) bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *Istishna*’ pada toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. b) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *Istishna*’ pada toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini terfokus pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *Istishna*. Hasil analisis pembahasan penelitian tersebut adalah:

“Menyatakan bahwa praktik jual beli pada toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara ini tidak sah karena tidak adanya kesesuaian dengan akad muamalah yang disepakati oleh penjual dan pembeli sebab pembeli melakukan penundaan

pembayaran. Hal ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah dalam hukum Islam.”⁷

Persamaan penelitian Yulia Safitri dengan penulis terletak pada persoalan jual beli pesanan/*Istishna*’ dan penundaan pembayaran. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Yulia Safitri fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran jual beli *istishna*’. Sedangkan fokus penelitian penulis disini lebih mendalami permasalahan ini yaitu penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori etika bisnis Islam, teori tanggung jawab, teori *maqasid syariah* dan teori kesepakatan. Teori kesepakatan atau dalam Islam sering disebut dengan akad, teori ini digunakan sebagai dasar untuk mengkaji penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan dari segi perjanjian atau akad yang mereka lakukan. Pengertian akad secara bahasa artinya mengikat (*Ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya sebagai potong benda. Makna

⁷ Yulia Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli *Istishna* Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec.Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara” (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019).

”*ar-rabithu*” secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.⁸

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁹ Tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.¹⁰ Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, para pihak dapat melakukan pembatalan akad atau mengakhiri akad sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Teori selanjutnya yang menjadi kerangka dalam penelitian ini adalah teori etika bisnis islam, yang digunakan untuk mengkaji penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan dari segi etika penjual maupun etika pembelinya saat terjadi penundaan pembayaran barang pesanan. Dalam melakukan jual beli, penjual dan pembeli hendaknya selalu mengedepankan prinsip-prinsip etika bisnis islam, karena etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an, Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 44.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

¹⁰ Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, (Januari 2012), 25.

mengenai etika bisnis yang dijadikan sebagai prinsip agar dijadikan sandaran bagi umatnya, di antaranya ialah:

- a. Jujur dalam takaran, ukuran, timbangan, komposisi, bahan dll. (*quantity*).
- b. Menjual barang yang baik mutunya (*quality*).
- c. Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*).
- d. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*).
- e. Membangun hubungan baik (*interrelationship*).
- f. Tidak memonopoli.
- g. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.
- h. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.
- i. Menetapkan harga dengan transparan.¹¹

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, bertanggung jawab dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹²

Dalam setiap perjanjian atau kesepakatan jual beli akan timbul tanggung jawab kepada masing-masing pihak sehingga dalam penelitian ini muncul teori tanggung jawab. Teori tanggung jawab ini digunakan untuk mengkaji penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang

¹¹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1 (April 2010), 55.

¹² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

pesanan dari segi kewajiban yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli akibat dari suatu perjanjian/kesepakatan. Pengertian tanggung jawab menurut KBBI adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Manusia dan tanggung jawab itu tidak bisa dipisahkan, karena sudah menjadi bagian hidup manusia. Tanggung jawab juga kewajiban yang harus dijalani sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan.¹³

Dalam penelitian ini juga terdapat teori *Maqashid Syariah*, teori ini digunakan untuk mengkaji penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan dari segi *Hifz al-Mal*/memelihara harta. Pengertian *Maqashid Syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukum. Dalam ekonomi Islam, harta dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah ataupun muamalah.¹⁴

Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan di dalam memelihara harta dalam jual beli, yaitu pencatatan, persaksian dan penyertaan dokumentasi. Dengan melakukan pencatatan, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi,

¹³ Fajri Asahi, "Pengertian Tanggung Jawab", dalam <https://ppkn.co.id/tanggung-jawab-adalah/> (10 Juni 2020)

¹⁴ Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Journal Of Islamic Lariba*, Vol. 3, Issue 2 (Juli-Desember 2017), 70.

memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang mengurangnya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi. Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini ditujukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga, terselamatkan hidupnya di dunia ataupun di akhirat, terselamatkan dari kefasikan dan agar keadilan ataupun ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujudkan.¹⁵

¹⁵ Ibid., 71.

C. Kerangka Konseptual

1. Jual Beli Pesanan (*Istishna'*)

a. Pengertian Jual Beli *Istishna'*

Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* (صنع) ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'* (ستصنع) yang berarti meminta untuk dibuatkan sesuatu. *Istishna'* secara etimologis adalah masdar dari *sitshna a'asy-sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *Istishna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.¹⁶

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antaran pihak pemesan dan pihak penjual.¹⁷ Adiwarmanto A Karim dalam bukunya menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, terlihat bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

¹⁷ Ibid.

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*’) dan penjual (pembuat, *shani*’).¹⁸

Transaksi jual beli *Istishna*’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha dari orang lain untuk membuat kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jumhur *fuqaha*, *Istishna*’ merupakan suatu jenis khusus dari akad *salam*. Biasanya, jenis ini digunakan di bidang di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan jual beli *Istishna*’ mengikuti ketentuan dan aturan akad *Salam*.¹⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa akad *Ishtisna*’ adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (penjual/pembuat barang) dimintakan oleh pihak kedua (pembeli/pemesan barang) untuk membuatkan suatu barang sesuai kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak kedua. Pihak pertama disebut *shani*’ yaitu penjual, sedangkan pihak kedua, yaitu pembeli disebut *mustashni*’, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu*’ atau barang yang dipesan (dibuat). Apabila bahan yang dibuat berasal dari

¹⁸ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 126.

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2008), 113.

mustashni' (pembeli) bukan dari *shani'* (penjual) maka akadnya bukan *Istishna'* melainkan *ijarah*.²⁰

Istishna' adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan *salam* karena :

- 1) Dalam *ishtisna'* harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar dimuka seperti pada akad *salam*.
- 2) Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan.
- 3) Barang yang dibuat tidak harus ada dipasar.²¹

Dalam redaksi lain, *salam* berlaku untuk barang yang dibuat dan lainnya. Adapaun *istishna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga di syaratkan membayar dimuka, sedangkan *istishna'* tidak di syaratkan demikian. Ada banyak hal yang sama antara *istishna'* dan *salam*. Misalnya, tempo yang ditentukan dalam *salam* merupakan masa untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat.²²

Sebagai bentuk jual beli, *Istishna'* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:

²⁰ Syafi'i Hidayat, "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 18.

²¹ Ibid.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 125.

- 1) Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- 2) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- 3) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- 4) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.²³

b. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna'*

Jual beli *Istishna'* kurang lebih sama dengan jual beli *Salam* dimana sama-sama memberikan uang terlebih dahulu tetapi *Istishna'* tidak harus, maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jual beli *Salam* juga berlaku pada jual beli pesanan/*istishna'*. Sebagian *Fuqaha* kontemporer berpendapat bahwa jual beli *Istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²⁴

Menurut mazhab hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya, di Indonesia ketentuan syar'i transaksi *istishna'* diatur dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.²⁵ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'*. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah, *istishna'* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.²⁶

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengatur manusia dari berbagai aspek kehidupan mulai dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar, tanpa terkecuali masalah jual beli. Seperti masalah jual beli *Istishna'* atau sistem pesanan yang merupakan kelanjutan dari jual beli *Salam*, pastinya mempunyai dasar hukum yang jelas dalam al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW ataupun Ijma' para ulama, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

²⁴ Antonio, Bank Syariah, 114.

²⁵ Karim, *Bank Islam*, 26.

²⁶ Yulia Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec.Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara" (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019), 27.

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar dibolehkannya jual beli sistem pesanan atau *Istishna'*, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . .

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. . ."*²⁷

Ayat ini merupakan ayat yang paling panjang di dalam al-Qur'an. Ayat ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah bagi hamba-hambaNya yang beriman jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.²⁸

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian hutang *salam*, dalam batas waktu yang ditentukan. *Faktubuh* Hendaklah kamu menuliskannya. Ini merupakan perintah dari Allah SWT supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Kemudian Ibn Kathir menukil dari pendapat Abu Sa'id, as-Sya'bi, Rabi' bin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid

²⁷ Al-Baqarah, 2: 282.

²⁸ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 562.

dan ulama lainnya mengatakan sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban, kemudian *dinasakh* (dihapuskan).²⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang mubah (boleh) jual beli *Istishna'* dan juga nasehat atau anjuran tentang apabila melakukan muamalah tidak tunai. Hendaknya dilakukan penulisan catatan berupa buku-buku perjanjian ataupun kwitansi agar lebih dapat menjaga dari penipuan, jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi dan juga agar tertib administrasi, sehingga nantinya akad memudahkan.

Selain dari ayat di atas, ada juga ayat lainnya yaitu surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁰

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya. Wahbah Az-Zuhaili

²⁹ Ibid., 563.

³⁰ An-Nisa, 4: 29.

menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor *syari'*. *Tijarah* adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. *Taradhi* (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.³¹

Dalam jual beli *Istishna'* juga harus ada saling percaya, ridho dan kebebasan diantara kedua belah pihak, tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri tanpa melihat akan perasaan orang lain. Karena itu sebagai manusia hidup bermasyarakat, maka suatu saat akan membutuhkan antara satu sama lain dan juga agar terwujudnya kemashlahatan umat.

2) Hadis

Selain dari al-Qur'an, Hadis juga termasuk sumber hukum dalam Islam yang kedudukannya satu tingkat di bawah al-Qur'an. ada beberapa sabda Rasulullah SAW tentang di bolehkannya akad *Istishna'*, seperti diriwayatkan dalam hadits yang shahih, sesungguhnya Rasulullah SAW juga pernah suatu ketika beliau memesan mimbar kepada budak milik seorang wanita Anshor yang

³¹ Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2 (Juli-Desember 2018), 249.

berprofesi sebagai tukang kayu. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam shahih bukhari No. 429 dari Sahl bin Sa'ad RA beliau berkata :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مُرِي غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ
لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang wanita dan berkata, "Perintahkan budakmu yang tukang kayu itu membuat tangga mimbar untukku, hingga aku bisa duduk di atasnya."³²

Diriwayatkan pula dalam shahih Bukhari No. 430 dari Jabir bin Abdillah RA beliau berkata :

حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا
نَجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَمِلْتُ الْمِنْبَرَ

"Telah menceritakan kepada kami Khallad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid bin Aiman dari Bapaknya dari Jabir bin 'Abdullah, bahwa ada seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku buatkan sesuatu untuk Tuan, sehingga Tuan bisa duduk di atasnya? Karena aku punya seorang budak yang ahli dalam masalah

³² Admin, "Shahih Bukhari" dalam <https://ibnumajjah.files.wordpress.com/2017/10/shahih-bukhari.pdf> (9 Februari 2020).

pertukangan kayu.” Beliau menjawab: “Silakan, kalau kamu mau.” Maka wanita itu membuat sebuah mimbar.”³³

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga pernah pesan cincin. Jika sistem *ishtisna'* ini adalah tidak boleh, tentu beliau tidak akan melakukannya. Karena tidak mungkin beliau Rasulullah SAW melakukan perkara yang haram. Perbuatan Rasulullah SAW ini merupakan salah satu pedoman bahwasanya akad dalam pemesanan itu diperbolehkan dalam hukum Dagang Islam. Selain dari pada pendapat para ahli fiqh dalam kaidah fiqh juga disebutkan,

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

3) Fatwa MUI

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan berkenaan dengan akad *Istishna'* yang harus jadi pedoman untuk menentukan kebolehan akad *Istishna'* yaitu,

a) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*.

Ketentuan tentang pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

³³ Ibid.

- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketentuan lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi

Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

b) No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli *Istishna'* Paralel.

Ketentuan Umum:

- 1) Jika LKS melakukan transaksi *Istishna'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna'* kedua.
- 2) LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani'*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Istishna'* (Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam *Istishna'* Paralel.

Ketentuan Lain:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

³⁴DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³⁵

c. Rukun Jual Beli *Istishna'*

Rukun dari *istishna'* yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*), dan
- 3) *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁶

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *istishna'* meliputi:

- 1) Transaktor, yakni pembeli (*mushtashni'*) dan penjual (*shani'*)

Transakstor terdiri atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan melililki yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi ndengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual

³⁵ DSN MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli *Istishna'* Paralel.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk*, 97.

menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.³⁷

2) Objek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*

Hukum objek akad transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain:

- a) Harus jelas spesifikasinya.
- b) Penyerahannya dilakukan kemudian
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.

³⁷ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), 254.

- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.³⁸
- 3) Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak.

Ijab dan qabul *istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli. Pelapasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara) tindakan maupun tulisan, tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. Menurut PSAK³⁹ 104 paragraf, pada dasarnya *istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.⁴⁰

d. Syarat-Syarat Jual Beli *Istishna'*

Syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) *Bai' al-istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) *Bai' al-istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.

³⁸ Ibid.

³⁹ PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

⁴⁰ Ibid.

- 3) Dalam *bai' al-istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) Pembayaran dalam *bai' al-istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁴¹

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

- 1) Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
- 2) Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri dan lainnya.
- 3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu peyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.⁴²

e. Ketentuan Pembayaran Jual Beli *Istisna'*

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 125-126.

⁴² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 201.

Dalam pelaksanaan jual beli tentu ada yang namanya ketentuan pembayaran, terkhusus jual beli *Istishna'*. Dalam Fatwa MUI mekanisme pembayaran yang perlu diperhatikan dalam jual beli *Istishna'* ialah:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁴³

Mekanisme pembayaran transaksi *istishna'* yang dapat disepakati dalam akad dilakukan dengan tiga cara, yakni :

- 1) Pembayaran dimuka secara keseluruhan

Proses ini merupakan pembayaran dengan keseluruhan harga barang pada saat dilakukan akad sebelum aktivitas pesanan yang dipesan oleh pihak pembeli atau penerima pesanan pada pembelian akhir. Cara pembayaran seperti ini sama halnya dengan pembayaran dalam transaksi *salam*.

- 2) Pembayaran setelah menyelesaikan barang

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada pembuat pesanan setelah barang yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara angsuran. Cara pembayaran *Istishna'* seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi *murabahah*.

⁴³ DSN MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*.

3) Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan dilakukan bertahap atau secara angsuran selama dalam proses pembuatan barang pesanan. Mengenai cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa cara sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang pesanan.⁴⁴

Ketentuan lain dari jual beli *istishna'* sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebut di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁵

f. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli *Istishna'* waktu penyerahan barang tidak menjadi keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan barang maksimal yang berarti bahwa jika penjual terlambat dalam menyelesaikan pesanan, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.

⁴⁴Rifqi Muhammad, *akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 231-232.

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 131.

Hukum objek akad transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.⁴⁶ Ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁴⁷

Dalam akad jual beli waktu penyerahan tertentu memang tidak merupakan keharusan. Apabila waktu ditentukan, menurut imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam* seperti penyerahan alat pembayaran di majlis akad. sedangkan menurut imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan .dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik

⁴⁶ Rizal yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*.

⁴⁷ Ibid.

waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishna'*.⁴⁸

g. Berakhirnya Akad *Istishna'*

Kontrak *istishna'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- 1) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- 3) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.⁴⁹

h. Tujuan dan Hikmah *Istishna'*

Dengan keijinan *syara'* dalam melakukan *salam*, maka tujuan jual beli *Istishna'* juga sama yaitu adanya saling tolong menolong diantara kedua belah pihak yang menguntungkan, yakni pihak yang memesan barang (pelanggan) dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhannya dengan bayaran yang dapat diangsur dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak selama tidak ada yang memberatkan atau terbebani salah satu pihak. Selain dari pada itu, pihak yang menawarkan barang untuk dipesan oleh pelanggan dapat mendatangkan keuntungan dikemudian hari, yang berarti dapat menambah kekayaan yang berguna untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Adapun

⁴⁸ Muhajirin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018), 78.

⁴⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2017), 197.

tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut yakni, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁵⁰

Setiap apa pun yang disyariatkan Allah SWT dan Rasulullah SAW, pasti mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya. Begitu pun juga hikmah yang terkandung dalam jual beli *Ishtisna'* adalah:

- 1) Untuk mempermudah manusia dalam bermu'amalat.
- 2) Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
- 3) Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar.
- 4) Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaannya.
- 5) Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.⁵¹

2. Penundaan Pembayaran

a. Pengertian Penundaan Pembayaran Hutang

Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda

⁵⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 61.

⁵¹ Ibid.

pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.⁵²

Menurut Ahmad Ifham Sholihin, Penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.⁵³ Jadi berdasarkan pengertian diatas, penundaan pembayaran ialah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan melakukan penundaan pembayaran yang melebihi waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda-nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalan musyawarah antara kedua belah pihak.

Penundaan pembayaran bisa dikategorikan sudah termasuk kedalam hutang, dalam Islam apabila orang memiliki hutang harus segera dibayarkan. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah sama dengan berbuat kedzaliman, Yang dimaksud dengan kedzaliman tersebut karena orang tersebut sudah mampu untuk membayar hutangnya tetapi dengan sengaja mengulur-ngulur waktu pembayarannya. Sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.

⁵² Safitri, *Tinjauan Hukum Islam*, 40.

⁵³ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَأَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezhaliman".⁵⁴

Menurut para ulama ahli hadits, makna riwayat di tersebut mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tatkala seseorang sudah cukup secara finansial dan mampu untuk membayar. Berbeda ketika seseorang dalam keadaan tidak memiliki uang yang cukup, maka ia tidak tergolong dalam cakupan hadits di atas. Dalam hal ini, Syekh Badruddin al-‘Aini menjelaskan: “Bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melakukan penundaan membayar utang setelah tetapnya utang tersebut, berbeda halnya dengan orang yang belum mampu (membayar),”.⁵⁵

Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang sudah memiliki uang yang cukup untuk membayar utangnya, tapi memiliki kendala (*udzur*) untuk menyerahkan uang tersebut, seperti karena uangnya tidak berada di tempat, atau halangan lain yang tak memungkinkan ia membayar segera. Dalam kondisi demikian, ia tidak berdosa tapi tetap

⁵⁴ Admin, “Shahih Bukhari” dalam https://ibnumajah.files.wordpress.com/2017/10/s_hahih-bukhari.pdf (9 Februari 2020).

⁵⁵ M. Ali Zainal Abidin, “Menunda Bayar Hutang Padahal Mampu adalah Kezaliman”, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/108064/menunda-bayar-utang-padahal-mampu-adalah-kezaliman> (8 April 2020).

berkewajiban membayar utangnya tatkala sudah mampu untuk menyerahkan uangnya.⁵⁶

Ketentuan di atas juga berlaku dalam permasalahan ketika seseorang telah memiliki uang yang cukup untuk membayar utang dan mampu untuk menyerahkan uangnya pada orang yang memberinya utang, tapi masa waktu utangnya belum jatuh tempo. Maka dalam keadaan demikian, ia diperkenankan untuk mengakhirkan pembayaran utangnya sampai batas waktu pembayaran yang telah disepakati. Sebab dalam hal ini orang yang memberi utang telah rela jika pembayarannya tidak langsung dibayar tatkala ia mampu, selama tidak melewati batas pembayaran yang telah ditentukan. Namun jika ternyata pada saat waktu jatuh tempo pembayaran ternyata ia tidak dapat membayar utangnya, karena adanya suatu hal, padahal sebelumnya ia berada dalam keadaan yang mampu, maka dalam hal ini ia dianggap teledor dan termasuk bagian dari orang zalim seperti yang dijelaskan dalam hadits di atas.⁵⁷

Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah segera membayar hak orang-orang yang wajib tunaikan. Dan hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah dalam hal tersebut, sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara masih tergantung pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Ibid.

b. Dasar Hukum Penundaan Pembayaran Hutang

Apabila orang memiliki hutang, dan orang tersebut mampu membayarnya pada waktu yang telah ditentukan, maka orang tersebut termasuk orang terpuji. Seperti yang dijelaskan dalam Hadis riwayat Bukhari No. 2416 berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ اشْتَرُوا
لَهُ سِنًا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ سِنًا إِلَّا سِنًا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرَوْهَا
فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Utsman bin Jabalah berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Syu'bah dari Salamah berkata, aku mendengar Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki yang kepadanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempunyai hutang lalu para sahabat ingin (memberinya pelajaran) namun Beliau berkata: "Biarkanlah dia, karena bagi pemegang kebenaran berhak menyatakan kebenarannya". Lalu Beliau berkata: "Belilah satu ekor anak unta lalu berikanlah kepadanya". Orang-orang berkata: "Kami tidak mendapatkan anak unta yang dimaksud melainkan ada seekor anak unta yang umurnya lebih". Beliau berkata: "Beli dan berikanlah kepadanya karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji".⁵⁸

Sedangkan apabila orang tersebut suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka orang tersebut termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.

⁵⁸ Admin, Shahih Bukhari.

Dalam agama Islam hukum menunda-nunda pembayaran hutang terbagi menjadi 2, yaitu haram dan mubah.

- 1) Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.

Dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

"Menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezhaliman."⁵⁹

Apabila orang tersebut menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti yang dijelaskan Hadis diatas maka hukumnya haram bagi yang orang tersebut dan merupakan dosa besar baginya.

- 2) Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau padahal dia mampu melunasinya tetapi dia mempunyai halangan untuk melunasinya, misalnya uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau alasan lainnya yang dibenarkan oleh agama, seperti yang dijelaskan firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan

⁵⁹ H.R. Bukhari No. 2225

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat ini adalah tuntunan bagi orang yang beriman dalam memberikan pinjaman hutang dan bersabar atas pengembalian yang terlambat dari yang meminjam. Sehingga tak perlu didesak, dipaksa dan diancam, sebab dengan keimanannya, hutangnya akan segera dilunasinya. Karena itulah yang terbaik di sisi Allah hendaknya yang kesulitan mengembalikan hutang pada waktu tempo pengembalian, dan diberi tangguh sampai ia lapang melunasinya. Namun jika hutang itu dibebaskan atau disedekahkan maka itulah yang paling terbaik di sisi Allah.

Dan juga seperti yang dijelaskan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُزْبَةً مِنْ كُزْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

“Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong

hambanya selama hambanya menolong saudaranya.” (H.R Muslim)⁶⁰

Berdasarkan hadits diatas Rasulullah SAW. Memberikan perintah kepada orang yang memberikan hutang, apabila orang tersebut yaitu yang berhutang ada dalam masalah kesulitan dan tidak mampu untuk melunasi, maka seseorang yang memberikan hutang tersebut di anjurkan untuk memberi waktu kelonggaran kepada yang berhutang dengan menunggu sampai ia mampu untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya. Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk membayarnya termasuk perbuatan dosa besar karena sama saja berbuat dzalim dan pelakunya menjadi *fasiq* karenanya. *Fasiq* adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya.⁶¹

Ada perbedaan pendapat tentang kefasiqan ini, yaitu apakah *fasiq* itu jatuh sebelum penagih hutang atau menjadi *fasiq* dengan sendirinya karena penundaan. Jika penghutang sengaja menunda pembayaran setelah jatuh tempo, maka dia menjadi *fasiq* sebelum hutang itu ditagih, dan apabila penghutang sengaja menunda pembayaran setelah orang yang berpiutang itu menagih, maka dia menjadi *fasiq* pada saat penagihan, dan apabila penghutang memang benar-benar sengaja berniat dari awal akan menunda pembayaran

⁶⁰ Admin, “Hadis 36: Membantu Sesama Muslim”. Dalam <https://haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/hadits-36-membantu-sesama-muslim/> (11 Februari 2020).

⁶¹ Jumadil Musa, “Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang” (Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2016), 96.

tersebut, maka ia akan menjadi *fasiq* dengan sendirinya. Karena itulah Rasulullah memberi peringatan yang keras agar jangan menunda-nunda pelunasan hutang, apabila sudah mampu hendaknya segera dilunasi.⁶²

c. Prinsip-Prinsip dalam Penundaan Pembayaran Hutang

Dalam melakukan pembayaran transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, kedua belah pihak tidak boleh mendatangkan kerugian yang dilarang, baik transaksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam bertransaksi ialah :

1) Prinsip Ridha

Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur *Tadlis* (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.⁶³ Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

⁶² Ibid., 97.

⁶³ Karim, *Bank Islam*, 31.

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam melakukan transaksi jual beli Allah SWT sudah menganjurkan agar setiap manusia yang bertransaksi jual beli hendaknya sudah ada unsur suka sama suka dan saling ridha diantara keduanya. Unsur ini pun menjadi sangat penting karena menjadi salah satu syarat sahnya jual beli dalam Islam.

2) Prinsip Tolong-Menolong

Prinsip tolong-menolong dalam Jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *ta'awun* (saling tolong menolong) di antara sesama manusia. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (keuntungan), sedangkan bagi seorang penjual juga secara tidak langsung menolong dengan memberikan barangnya.⁶⁴ Prinsip *Ta'awun* ini dijelaskan Allah SWT dalam Firmannya Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi,

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Setiap melakukan akad transaksi harus ada unsur *Ta'awun* atau tolong-menolong antara keduanya agar sama-sama saling menguntungkan dalam transaksi yang dilakukan. Perintah bertolong-

⁶⁴ Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 89.

tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an.

3) Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad.⁶⁵ Setiap sesuatu yang dilakukan itu apabila menimbulkan *Kemudharatan* hendaknya harus ditinggalkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Az-Zumar ayat 55,

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya".

Apabila sesuatu yang menjadi penyebab *kemashlatan* itu banyak dan harus dilakukan diwaktu yang sama, maka lebih baik pilih lah yang paling banyak *mashlahatnya*.

4) Prinsip Keadilan

Adil merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek perekonomian. Berbeda dengan adil, kebalikannya adalah dzalim. Sifat yang dilarang oleh Allah SWT pada dirinya. Allah

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 83.

sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil dan sangat memusuhi sikap dzalim.⁶⁶ Keadilan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 90,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Prinsip keadilan ini merupakan salah satu prinsip yang paling dasar dan harus dimiliki oleh manusia manapun, kaitan keadilan dengan hidup manusia adalah tidak lain agar terciptanya keharmonisan hidup antar sesama yang sudah ditakdirkan Allah SWT atau yang biasanya disebut dengan *Sunatullah*.

5) Prinsip Pertanggungjawaban

Pada dasarnya manusia dan pertanggungjawaban itu berada dalam satu naungan atau berdampingan. Pertanggungjawaban adalah suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Prinsip tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran Islam sehingga ia ditekankan dalam banyak ayat al-Qur'an dan dalam banyak Hadits Nabi, karena berkaitan dengan kehidupan manusia sendiri. Pertanggungjawaban ini meliputi

⁶⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

beragam aspek, yakni pertanggungjawaban kepada Allah SWT, pertanggungjawaban kepada agama, pertanggungjawaban kepada keluarga, pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara.

Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Manusia didalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan.⁶⁷

6) Prinsip Tidak Ada Unsur *Gharar*

Pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Praktik jual beli *gharar* dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku dalam melakukan kegiatan transaksi.⁶⁸ Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188,

⁶⁷ Notowidagdo, Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), 153.

⁶⁸ Karim, *Bank Islam*, 33.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Maraknya terjadi unsur gharar terdapat dalam jual beli dikarenakan ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan diri dari godaan dan tipu daya setan di kehidupan dunia. Mereka hanya memikirkan keuntungan yang diperoleh dan kenikmatan yang didapat tanpa memikirkan kehidupan yang abadi setelah kehidupan hari ini, padahal Allah sudah secara tegas memberi peringatan terkait unsur *gharar* ini.

d. Dampak Penundaan Pembayaran Hutang

Agama Islam sangat memperhantikan sekali tentang hutang, dan juga selalu mewanti-wanti agar tidak mudah berhutang kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Dalam Islam apabila seorang muslimin memiliki hutang dan merasa sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka bersegeralah untuk membayar hutang. Jika sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu adalah perbuatan dzalim kepada saudara seimannya.

Dampak yang ditimbulkan karena melanggar kesepakatan dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak, seperti melakukan

penundaan pembayaran hutang saat membeli barang menyebabkan penjual mendapat kerugian. Karena itu melanggar kesepakatan awal bersama antara penjual dan pembeli. Dampak tidak hanya didapatkan oleh penjual saja dampak bagi pembeli pun ada, bahkan dampaknya lebih besar dari dampak penjual karena akan mendapatkan kerugian didunia maupun di akhirat apabila dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran hutang tersebut. Ada beberapa dampak yang didapatkan pembeli imbas melakukan penundaan pembayaran tersebut, yaitu:

- 1) Tidak akan dipercaya oleh orang lain lagi.
- 2) Mendekatkan diri menuju *Kekufuran*
- 3) Menjadi pemicu sifat tidak jujur.
- 4) Urusannya akan selalu menggantung.
- 5) Jika meninggal dan membawa hutang, ia akan terhalang masuk surga meskipun mati syahid.
- 6) Keadaannya atau nasibnya tidak jelas atau tidak pasti apakah akan selamat atau binasa.
- 7) Orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasi, akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri.
- 8) Pahala kebaikan selama hidupnya akan dijadikan untuk menebus hutangnya di hari kiamat.

- 9) Status berhutang membuat pelakunya mendapatkan kehinaan disiang hari dan kegelisahan di malam hari.⁶⁹

Berdasarkan beberapa uraian yang dijelaskan di atas maka dapat dipahami, bahwa apabila melakukan transaksi jual beli jangan terlepas dan jangan bertentangan dari prinsip-prinsip hukum Islam tersebut. Dampak yang akan diperoleh apabila melakukan penundaan pembayaran akan merugikan diri sendiri serta orang lain dan dampaknya pun sangat besar. Segala sesuatu yang dilakukan harus mengetahui akibat-akibat yang akan diperoleh oleh diri sendiri ataupun orang lain. Karena adanya ancaman di dunia maupun di akhirat, prinsip-prinsip muamalah harus diterapkan dalam melakukan jual beli antara penjual dan pembeli agar akad jual beli yang dilakukan tersebut menjadi sah dalam hukum Islam sehingga mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah SWT.

3. Wanprestasi dan Penyelesaiannya

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi disebut juga dengan istilah "cidaera janji", yang maksudnya adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi

⁶⁹ Raehanul Bahraen, "Bahaya Tidak Segera Membayar Hutang Padahal Mampu", dalam <https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padahal-mampu.html> (12 Februari 2020).

atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.⁷⁰

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmacht di bagi dua yaitu:

- 1) Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.⁷¹

Wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa, “diwajibkannya penggantian biaya yang menyebabkan kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, bila debitur, walaupun sudah dinyatakan lalai, tetap melalaikannya tidak peduli dengan teguran yang diberikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam tenggang waktu yang telah

⁷⁰ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 17.

⁷¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Adtya Bakti, 2010), 241.

dilampauinya.”⁷² Maksudnya para pihak melakukan prestasinya tetapi terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Wanprestasi menurut ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih di sebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syarak*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁷³

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian yang diderita, dan pemenuhan perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian.⁷⁴

Ketentuan dalam ekonomi Islam, apabila salah satu pihak melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi, ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Jadi tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan

⁷² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia)*, (Jakarta: Kencana 2010), 261.

⁷³ Anwar, *Hukum Perjanjian*, 332.

⁷⁴ Abdul, *Hukum Perdata*, 241-243.

kerugian kreditur itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut⁷⁵ Para pihak yang melanggar akad mempunyai hak dan kewajiban untuk mengganti semua kerugian. Seperti dalam pemesanan barang baik itu wanprestasi yang ditimbulkan oleh pemesan ataupun wanprestasi dari pembuat barang.

Dalam al-Qur'an sudah diatur bahwa setiap manusia harus memenuhi setiap akad yang telah dibuat, agar tidak terjadi wanprestasi. Yaitu firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ ۖ عَلَيْكُمْ
غَيْرُ مُحْلِلٍ لِصَيْدِهِمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّا اللَّهُ نَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, (Aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*⁷⁶

Tafsir dari ayat di atas bahwa Allah memulai tuntunan-Nya ini dengan menyeru: hai orang-orang yang beriman, untuk memberikan kebenaran iman kalian, penuhilah akad-akad itu, yakni baik akad antara kamu dan Allah yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada Nabi-Nya ataupun melalui nalar yang dianugerahkan-Nya kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjalin antara kamu dan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dan diri kamu sendiri.

⁷⁵ Anwar, *Hukum Perjanjian*, 86.

⁷⁶ Al-Maidah, 5: 1.

Bahkan, semua perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.⁷⁷

Ayat di atas merupakan anjuran untuk menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah SWT menyuruh setiap manusia untuk menunaikan akad-akadnya dan berkomitmen terhadap akad yang telah dibuat. Kemudian al- Qur'an sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji yang sempurna, dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia kepada setiap diri manusia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu tidak sah dan ditolak tidak wajib ditunaikan.

b. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*sulhu*), yang kedua dengan jalan Arbitrase (*tahkim*), dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-qada*).⁷⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN MUI *sulhu* (perdamaian), merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad oleh para pihak. Dalam fiqh pengertian *sulhu* adalah suatu jenis usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam,

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah vol 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 8.

⁷⁸ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 96.

dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.⁷⁹ Dengan melakukan perdamaian melalui musyawarah oleh para pihak akan menghasilkan keputusan yang *win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaiannya bisa dengan batal perjanjian jual belitetapi ganti rugi, batal perjanjian jual beli tetapi uang muka tidak bisa dikembalikan (*Urbun*) atau perjanjian jual beli tetap berlanjut dengan melakukan pembaharuan perjanjian (*Addendum*).

Dalam konteksnya *sulhu* dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

- 1) *Sulhu ibra* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya atau hanya mengambil sebagian dari hutang yang berhak ia terima. Seperti apabila perjanjian jual belinya batal, uang muka atau panjar yang diserahkan diawal tidak bisa dikembalikan lagi sebagai ganti rugi akibat pembatalan itu.
- 2) *Sulhu Muawadah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada hak yang lain. Hukum yang berlaku pada *sulhu* ini adalah hukum jual beli.⁸⁰

Perdamaian (*Sulhu*) ini disyariatkan berdasarkan al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9 yang bunyinya:

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 195.

⁸⁰ Ibid., 199-200.

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁸¹

Tafsir dari ayat ini ialah Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai ketentuan hukum Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka, karena Allah menyukainya dan akan

⁸¹ al-Hujurat, 49: 9.

memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan.⁸²

Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka tidak satupun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi. Dengan disetujuinya perjanjian yang tercantum dalam proses perdamaian itu.

Penyelesaian wanprestasi bisa juga dilakukan melalui *tahkim* istilah *tahkim* berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *tahkim* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. *Hakam* atau lembaga *hakam* bukan lah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut *tahkim*, dan orang yang ditunjuk disebut *hakam*. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal dengan arbitrase. Arbitrase dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjukan secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa, guna untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk.⁸³ Dasar hukum *tahkim* yaitu al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35 yang bunyinya:

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 9* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 406.

⁸³ Gemala, *Hukum Perikatan*, 88-89.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸⁴

Tafsir dari ayat ini ialah, Jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut di atas, maka kirimlah seorang *hakam* (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Kedua *hakam* itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas *hakam* itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian. Jika usaha kedua orang *hakam* dalam mencari islah antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan

⁸⁴ An-Nisa, 4: 35.

lagi penunjukan dua *hakam* yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang *hakam* yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.⁸⁵

Selanjutnya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan *al-qada*, *al-qada* berarti menetapkan. Menurut istilah fiqh berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadi* (hakim).

Selain penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia juga memberikan beberapa pilihan penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian secara *litigasi* dan non *litigasi*.⁸⁶ *Litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dipengadilan, sedangkan Non *Litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 165.

⁸⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 182.

Penyelesaian suatu masalah, termasuk dalam penyelesaian wanprestasi dalam akad *istishna'* sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdamaian, baik melalui *sulhu* maupun *tahkim*. Dalam hal melalui *tahkim*, *hakam* sebagai pihak yang dipercaya dalam lembaga *tahkim* sangat berperan penting dalam proses mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar persoalan tidak semakin rumit dan akhirnya harus diselesaikan di pengadilan.⁸⁷

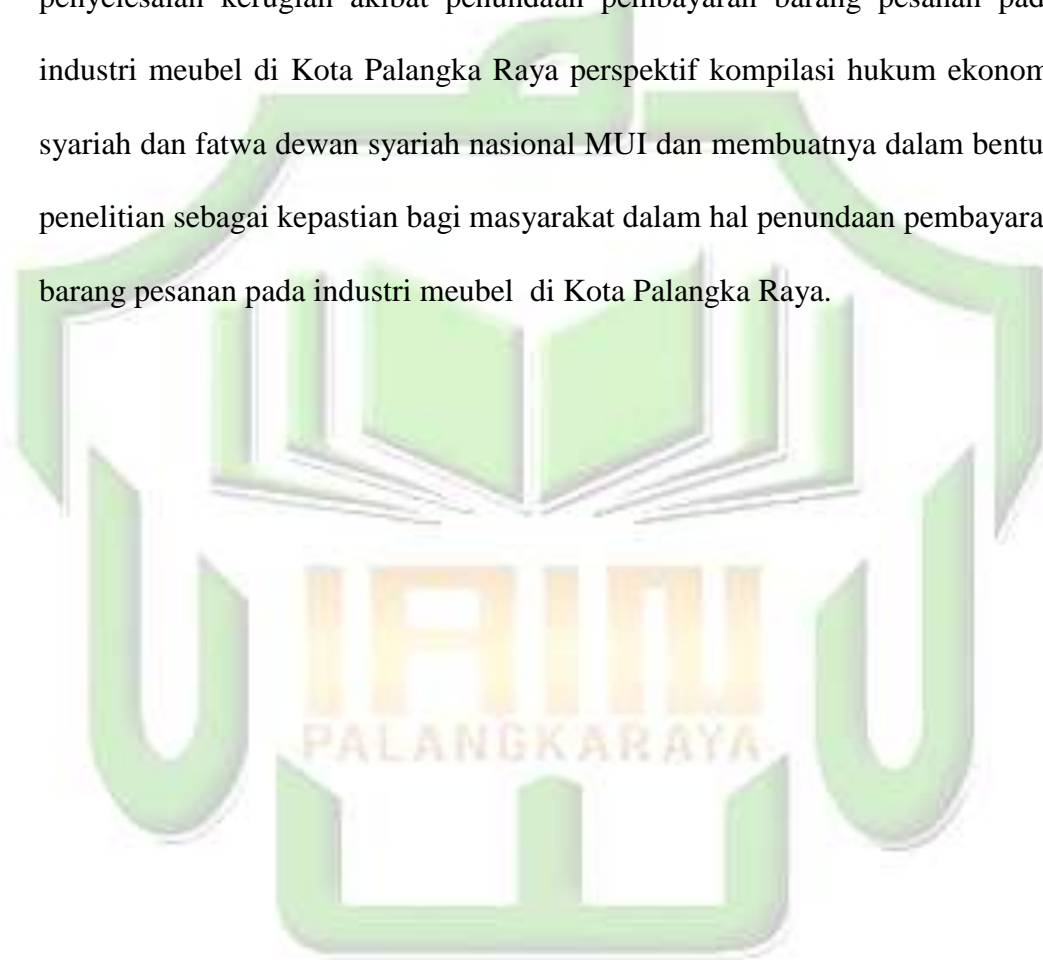
D. Kerangka Pikir

Jual beli sangat bermanfaat bagi tiap-tiap manusia, bisa dikatakan sebagai tolong menolong antar sesama manusia. Namun dalam praktiknya jual beli tidak sedikit menimbulkan perselisihan dan permasalahan. Permasalahan yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah masalah penundaan pembayaran barang pesanan. penundaan pembayaran barang pesanan ini tidak bisa dihindari, karena banyaknya kebutuhan manusia atau alasan yang lainnya sehingga muncul secara tak terduga.

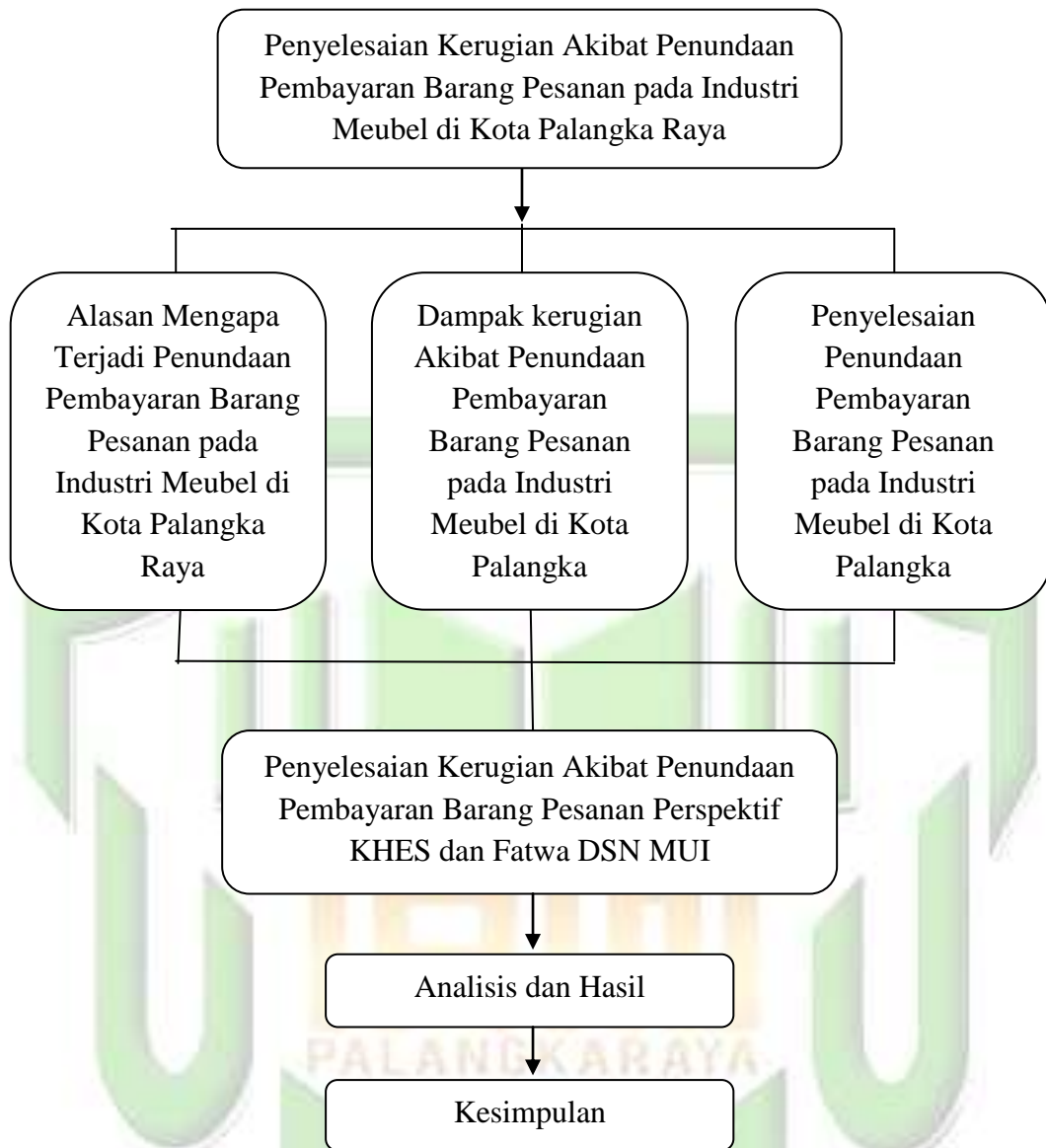
Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ini bisa membuat penjual mendapat kerugian, seperti kerugian waktu dan materil karena untuk membuat barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli memakan banyak waktu dan memerlukan modal untuk membeli bahan baku dan juga untuk upah tukang pembuat pesanan tersebut. Sehingga membuat salah satu pihak yaitu penjual merasa dirugikan oleh pembeli.

⁸⁷ Gemala, *Hukum Perikatan*, 89-90.

Dalam penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan penjual tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bersimpangan dengan prinsip syariah, mengingat Agama Islam selalu menginginkan kesesuaian dalam setiap perjanjian jual beli demi terwujud kemaslahatan umat Islam. Sehingga dalam memberikan tanggapan permasalahan tersebut penulis mencoba mengkaji penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa dewan syariah nasional MUI dan membuatnya dalam bentuk penelitian sebagai kepastian bagi masyarakat dalam hal penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya.



Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya) adalah selama 10 (Sepuluh) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Februari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Tabel 1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian		Waktu Pelaksanaan						
			Feb – Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt
1	Perencanaan	Penyusunan Proposal							
		Seminar Proposal							
		Revisi Proposal							
2	Pelaksanaan	Pengumpulan Data							
		Analisis Data							
		Pengambilan Kesimpulan							
3	Pelaporan	Sidang Skripsi							

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di Kota Palangka Raya berdasarkan pertimbangan penulis, pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini di antaranya adalah: a) Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada meubel di Kota Palangka Raya. b) Objek dan Subjek penelitian ada di Kota Palangka Raya. c) Melihat cukup banyaknya industri pengolahan kayu/meubel di Kota Palangka Raya sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini memungkinkan untuk digali secara komprehensif. Adapun meubel tempat penelitian pada penelitian ini yaitu pada Meubel Ananda, Meubel Nadia, Meubel Meyda dan Meubel Riadi.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju

kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁸⁹ Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *fiqh* dan pendekatan penelitian *ushul fiqh*. Dengan pendekatan *fiqh* penulis ingin mengkaji dan memahami penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan berdasarkan nash-nash al-Qur'an, Hadis dan juga Ijma' ulama dalam kajian *fiqh muamalah*. Sehingga penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun dengan pendekatan *ushul fiqh* penulis ingin mengkaji dan memahami penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh para ulama dan *fuqaha*. Yang mana kaidah-kaidah itu biasanya disebut dengan dalil-dalil *syara'* yang umum (*al-adillah al-syar' iyyah al-kulliyyah*)

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),16.

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu permasalahan penundaan pembayaran barang pesanan. Dimana permasalahan ini sering terjadi di masyarakat, tanpa masyarakat mengetahui konsekuensinya, hal itulah yang menarik perhatian penulis. Sehingga tertarik menjadikan objek dalam penelitian ini yaitu adalah penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palanga Raya, sedangkan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang diamati sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Untuk menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut, yaitu pelaku usaha/penjual yang berkedudukan sebagai pemilik atau orang yang menjalankan usaha toko meubel yang beragama islam, minimal lama berjualan lebih dari 1 (satu) tahun dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti menemukan 4 (empat) subjek yaitu pelaku usaha dari meubel Ananda, meubel Meyda, meubel Riadi dan Meubel Nadia. Sedangkan kriteria-kriteria konsumen/pembeli yang dijadikan sebagai subjek penelitian yaitu konsumen/pembeli yang pernah memesan barang dan melakukan penundaan pembayaran pada meubel yang menjadi lokasi penelitian minimal satu kali, beragama Islam, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti menemukan 4 (empat) subjek yaitu NW, MS, AA dan ST.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹⁰ Dengan melakukan pengumpulan data, peneliti akan memperoleh data-data yang akurat terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dipenelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat data⁹¹ Dengan wawancara inilah peneliti berkomunikasi langsung dengan pemilik meubel yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan informasi, data ataupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Adapun data yang ingin digali melalui teknik wawancara ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian yaitu:

a. Penjual

- 1) Seberapa sering dalam satu bulan terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel ini?

⁹⁰Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: CV alfabeta, 2014), 62-63.

⁹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

- 2) Apa penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel ini?
- 3) Apa kerugian yang didapat oleh bapak/ibu akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel?
- 4) Apakah penundaan pembayaran yang dilakukan pemesan mempengaruhi omset atau proses produksi pada meubel ini?
- 5) Bagaimana cara penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel ini?
- 6) Apabila ada pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dan tidak ada kabar, berapa lama batas waktu yang ditentukan sebelum memutuskan perjanjian jual beli pada meubel ini?
- 7) Apakah pernah dan kenapa disaat sudah diselesaikan dengan musyawarah ternyata tidak jadi membeli barang pesanannya pada meubel ini?
- 8) Apakah ada barang pesanan yang tidak diambil oleh pemesan pada meubel ini?
- 9) Apakah ada pembeli yang melakukan komplek karena barang pesanannya dijual ke orang lain saat sudah melewati batas waktu pelunasan jual beli pada meubel ini?

b. Pembeli

1. Berapa kali bapak/ibu pernah melakukan penundaan pembayaran barang pesanan?
2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu sampai melakukan penundaan pembayaran barang pesanan?
3. Berapa lama bapak/ibu melakukan penundaan pembayaran barang pesanan?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan itu bisa membuat penjual mendapat kerugian?
5. Apa yang dilakukan oleh bapak/ibu saat melakukan penundaan pembayaran barang pesanan?
6. Apakah saat bapak/ibu melakukan penundaan pembayaran barang pesanan, bapak/ibu tetap melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian barang pesanan?
7. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan oleh penjual?

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan

penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁹²

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.⁹³

Di observasi dalam penelitian ini adalah seperti proses awal produksi meubel, cara pemesanan, cara jual beli, proses penyelesaiannya dan lain-lain yang menurut peneliti bisa menunjang data dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa

⁹² Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 216.

⁹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, dan lain-lain.⁹⁴

Kegunaan dari adanya dokumentasi adalah untuk mendukung data-data yang sudah didapat dari metode observasi. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁹⁵

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berbentuk catatan, transkrip, dokumen-dokumen penting, kwitansi dan foto/gambar yang berkaitan dengan penelitian penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan ini.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diobservasi dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi di lapangan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut benar. Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.⁹⁶ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu

⁹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 82.

⁹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 217.

⁹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁹⁷

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan.⁹⁸

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

⁹⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.

⁹⁸ *Ibid.*, 178.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹⁹

Persoalan penyelesaian kerugian akibat penundaan barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya ini, pertama di analisis menggunakan teori kesepakatan atau dalam Islam sering disebut dengan akad, teori ini digunakan untuk menganalisis dari segi perjanjian atau akad yang mereka lakukan dalam menyelesaikan permasalahan penundaan barang pesanan.

Kedua, teori etika bisnis Islam. Teori ini digunakan untuk menganalisis penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan dari segi etika para pihak, apakah etika para pihak ini sudah sesuai dengan etika-etika yang sudah disyariatkan oleh agama Islam dalam berbisnis sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dan menghasilkan kemashlahatan.

Ketiga, teori tanggung jawab. Teori ini digunakan untuk menganalisis penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan dari segi tanggung jawab para pihak. Apakah dalam jual beli tersebut apabila terjadi permasalahan para pihak menunaikan kewajiban mereka, sebagai tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan persoalan jual beli ini, karena agama Islam sangat menekankan untuk amanah terhadap tanggung jawab.

Keempat, teori *maqashid syariah*. Teori ini digunakan untuk menganalisis penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan dari segi memelihara harta. Karena Islam mewajibkan umat untuk

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2017), 224.

memelihara harta agar terhindar dari yang haram, dalam *maqashid syariah* kepemilikan harta terbagi menjadi 3, yaitu *darurriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Bertujuan untuk menghindarkan dari memperoleh harta yang haram.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam membangun kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,853,52 Km².¹⁰⁰

2. Letak Geografi

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`- 114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat: Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya,

¹⁰⁰ Admin, “Portal Resmi Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (25 Juni 2020).

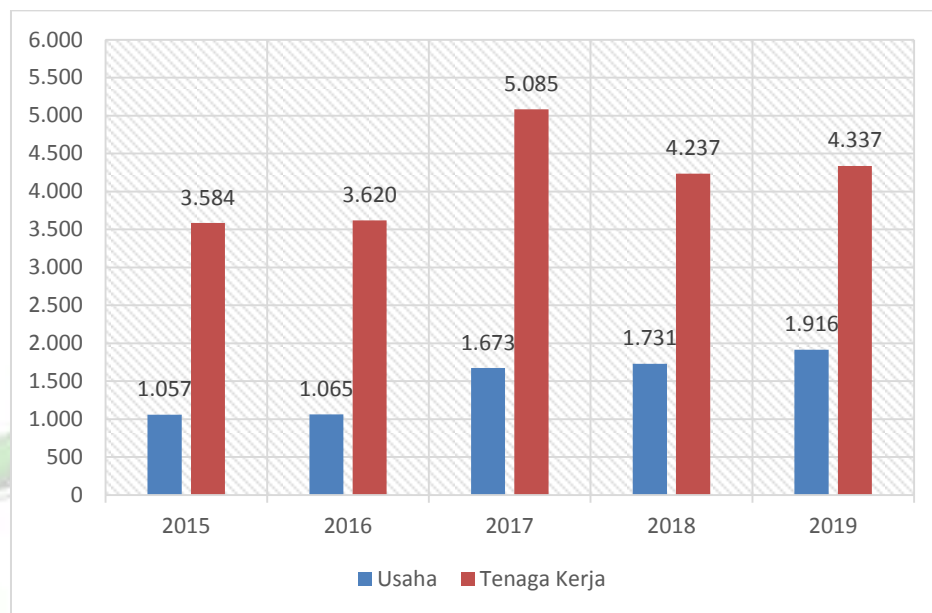
Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.¹⁰¹ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang,

¹⁰¹Admin, “Portal Resmi Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (25 Juni 2020).

Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹⁰²

3. Data Industri Mikro dan Kecil di Kota Palangka Raya



Tabel 2

Data jumlah usaha industri mikro dan kecil di Kota Palangka Raya pada Tahun 2015 sebanyak 1.057 usaha dan terus meningkat pada tahun 2016 naik menjadi 1.065 usaha, pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.673 usaha,¹⁰³ pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.731 dan pada tahun 2019 naik meningkat lagi menjadi 1.916.¹⁰⁴ Demikian pula untuk tenaga kerjanya, pada tahun 2015 terserap 3.584 orang, kemudian

¹⁰²Stanley Adrian, “Profil Kota Palangka Raya”, dalam <https://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> (25 Juni 2020).

¹⁰³ Admin, “Industri Kecil dan Menengah”, dalam <https://palangkaraya.go.id/potensi-daerah/industri-kecil-dan-menengah/> (2 September 2020).

¹⁰⁴ Admin, “Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi pada Industri Mikro dan Kecil di Kota Palangka Raya 2018-2019”, dalam <https://palangkakota.bps.go.id/dynamictable/2020/05/18/243/jumlah-perusahaan-tenaga-kerja-investasi-dan-nilai-produksi-pada-industri-mikro-dan-kecil-di-kota-palangka-raya-2018-2019.html> (2 September 2020).

naik menjadi 3.620 orang pada tahun 2016, kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 5.085 tenaga kerja, pada tahun 2018 menurun menjadi 4.273 dan pada tahun 2019 naik menjadi 4.337.

Pembangunan dan penataan kawasan industri Temanggung Tilung menjadi prioritas utama bidang industri dalam rangka mewujudkan Palangka Raya sebagai sentra industri kreatif bercirikan khas daerah berbahan dasar kayu dan rotan.

Adapun jenis industri mikro dan kecil yang ada di Kota Palangka Raya meliputi: Sentra Industri Temanggung Tilung, Industri Kerajinan Anyaman Rotan, Industri Kerajinan Benang Bintik, Industri Kerajinan Batu Permata, Industri Kerajinan Getah Nyatu, Industri Kerajinan Furniture dan Ukiran Kayu dan Industri Pangan.

4. Gambaran Subjek Penelitian

a. Meubel Ananda

Meubel Ananda merupakan sebuah industri rumah tangga yang bergerak dibidang pengolahan kayu, yaitu produksi dan penjualan meubel. Produk dari meubel ananda ini adalah berbagai jenis peralatan meubel keperluan rumah tangga.

Meubel Ananda berdiri pada tahun 2015, yang dimiliki oleh sepasang suami istri, pada awalnya berlokasi di Jl. Rajawali km 4,5 karena kontrak tempat usahanya habis dan karena lokasinya yang jauh dari rumah. Mereka memutuskan untuk pindah dan sekarang berlokasi di Komplek Marina Permai Kelurahan Langkai Kecamatan

Pahandut Kota Palangka Raya. Meubel Ananda ini berawal dari sebuah bakat sang suami membuat peralatan meubel dan didukung dengan adanya peluang usaha dibidang pengolahan kayu pada saat itu, sehingga mereka mempunyai inisiatif untuk membuka usaha meubel yang menjual lemari pakaian, lemari hias, meja makan dan lain-lain. Pada awal kegiatan produksinya, meubel ananda melakukan pengerjaan meubel disamping rumah mereka dan menggunakan modal seadanya milik sendiri. Modal awal yang dikeluarkan senilai kurang lebih 10 Juta yang digunakan untuk membeli bahan baku utama yaitu kayu dan peralatan mesin untuk memudahkan proses produksi. Semakin bertambahnya pelanggan yang mengetahui pembuatan meubel dan banyak pesanan yang di pesan oleh pembeli, ibu N dan suami menambahkan modal lebih besar kurang lebih 20 juta yang digunakan untuk menyewa satu buah toko dan menambah karyawan untuk membuat barang-barang tersebut.

Kegiatan transaksi jual beli ini berjalan sangat lancar, ibu N sudah mempunyai banyak pelanggan dan bertambahnya barang pesanan yang dibuat. Seiring berjalannya waktu, usaha meubel tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ketahun. Toko meubel tersebut dinamai oleh ibu N Toko meubel Ananda dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

Dalam kegiatan industrinya Meubel Ananda memproduksi pesanan berdasarkan pesanan dari pembeli dan juga menyediakan produk yang sudah jadi, bisa juga melayani desain sesuai permintaan pembeli. Meubel Ananda sendiri mendapatkan pesanan kurang lebih berjumlah 10 sampai 20 pesanan dalam satu bulan. Dari pesanan tersebut berbeda-beda dalam pemesanannya seperti pesanan lemari pakaian, lemari tv, meja makan dan lainnya. Cara pembayaran yang dilakukan dengan sistem berbagai macam seperti, membayar uang muka terlebih dahulu, kredit dan lunas.

Modal yang dikeluarkan oleh ibu N dalam sebulan kurang lebih 10 juta dan Omset bersih yang didapat meubel Ananda dalam sebulan keuntungan bisa mencapai 15 juta perbulan bahkan bisa lebih jika orderan pesanan dan meubel yang sudah jadi semakin bertambah.

Produk yang dijual adalah berbagai perabotan lemari pakaian besar, lemari pakaian kecil, meja makan, meja kecil, tempat tidur, dan semua barang meubel sebagai barang kebutuhan rumah tangga. Salah satu produk yang paling diminati ialah lemari pakaian.¹⁰⁵

b. Meubel Meyda

Meubel Meyda merupakan sebuah industri rumah tangga yang bergerak dibidang pengolahan kayu, yaitu produksi dan

¹⁰⁵ N, *Observasi* (Palangka Raya, 11 Juli 2020).

penjualan meubel. Produk dari Meubel Meyda ini adalah berbagai jenis peralatan meubel keperluan rumah tangga.

Sejarah berdirinya Meubel Meyda ini dimulai pada tahun 2005, berawal dari industri meubel milik sang ayah. Bapak S selaku pemilik Meubel Meyda memutuskan untuk memulai usahanya sendiri secara mandiri, karena pada saat itu industri meubel ini masih sedikit sehingga membuat peluang usaha yang sangat menjanjikan.

Pada awal membuka usahanya, bapak S menggunakan modal milik sendiri. Modal awal yang dikeluarkan senilai 2 juta rupiah yang digunakan untuk membeli bahan baku utama yaitu kayu, sedangkan untuk peralatan mesin dimasa awal merintis menggunakan mesin yang dipinjam dari sang ayah. Setelah mendapatkan hasil keuntungan dari membuka usaha sendiri, bapak S membeli peralatan mesin untuk menunjang dan memudahkan produksi, modal yang dikeluarkan untuk membeli peralatan mesin ini senilai kurang lebih 5 juta yang pada tahun itu nilainya lumayan banyak.

Pada awalnya bapak S membuka usahanya di Jl. RTA Milono Km 6 dengan menyewa sepetak tanah dengan ukuran $10 \times 20 \text{m}^2$ yang berada dipinggir jalan raya, akan tetapi setelah 5 tahun lebih membuka usaha ditempat itu. Bapak S harus pindah ke tempat lain karena lahan tersebut mau dibangun pertokoan oleh pemiliknya, sekarang lokasi dari Meubel Meyda ini berada di Jl.

RTA Milono Km 7,5 dengan menyewa satu buah toko dengan ukuran yang lumayan besar, bapak S menyewa toko tersebut dengan biaya 15 juta pertahun. Sampai sekarang perkembangan meubel meyda ini cukup pesat dan banyak diketahui oleh masyarakat.

Dalam kegiatan industrinya Meubel Meyda memproduksi pesanan berdasarkan pesanan dari pembeli dan juga menyediakan produk yang sudah jadi, bisa juga melayani desain sesuai permintaan pembeli. Meubel Meyda sendiri mendapatkan pesanan kurang lebih berjumlah 20 sampai 40 pesanan dalam satu bulan karena tidak hanya melayani untuk yang mau dipakai sendiri, tetapi kadang ada juga orang melakukan pesanan meubel untuk dijual kembali, meubel Meyda sendiri juga menerima borongan perabotan sekolah ataupun kantor. Dari pesanan tersebut berbeda-beda dalam pemesanannya seperti pesanan lemari pakaian, lemari tv, meja makan dan lainnya. Cara pembayaran yang dilakukan dengan sistem berbagai macam seperti, membayar uang muka terlebih dahulu, kredit dan lunas.

Modal yang dikeluarkan oleh bapak S dalam sebulan kurang lebih 15 juta dan Omset bersih yang didapat meubel Meyda dalam sebulan keuntungan bisa mencapai 20 juta perbulan bahkan bisa lebih jika orderan pesanan dan meubel yang sudah jadi semakin bertambah.

Produk yang dijual adalah berbagai perabotan lemari pakaian besar, lemari pakaian kecil, meja makan, meja kecil, tempat tidur,

dan semua barang meubel sebagai barang kebutuhan rumah tangga. Salah satu produk yang paling diminati ialah lemari pakaian, meja makan terkadang meja kecil.¹⁰⁶

c. Meubel Nadia

Meubel Nadia merupakan sebuah industri rumah tangga yang bergerak dibidang pengolahan kayu, yaitu produksi dan penjualan meubel. Produk dari Meubel Nadia ini adalah berbagai jenis peralatan meubel keperluan rumah tangga.

Toko meubel Nadia adalah toko usaha sendiri yang dibangun oleh ibu K dan suaminya. Sejarah berdirinya Meubel Nadia ini dimulai pada tahun 2018, sebelum memulai usaha meubel, Ibu K pada awalnya memiliki usaha toko sembako di Pasar Besar Kota Palangka Raya. Karena ada sesuatu hal, Ibu K memutuskan mengalah dan memilih memulai usaha yang baru di bidang Meubel karena menilai usaha meubel ini cukup menjanjikan di Kota Palangka Raya.

Lokasi dari Meubel Nadia ini berada di Jl. RTA Milono Km 2,5 dengan menyewa toko atau ruko dengan biaya 18 juta pertahun, tempatnya yang cukup strategis karena berada dipinggir jalan raya dan dekat dengan pusat kota sehingga cukup ramai.

Berawal dari membuka usaha dengan barang atau modal yang seadanya karena ibu K menggunakan modal milik sendiri,

¹⁰⁶ S, *Observasi* (Palangka Raya, 11 Juli 2020).

modal awal yang dikeluarkan senilai kurang lebih 15 juta yang digunakan untuk membeli barang-barang meubel untuk mengisi toko, karena pada saat memulai usaha Ibu K belum memproduksi sendiri hanya membeli dari pengrajin lokal dan pengrajin luar daerah seperti dari Kota Amuntai. Setelah beberapa bulan dan sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan, karena juga semakin bertambahnya pelanggan yang mengetahui usaha meubel Nadia dan semakin bertambahnya pesanan yang di pesan oleh pembeli, ibu K mengeluarkan modal lagi sekitar 15 juta lebih untuk membeli peralatan mesin untuk memproduksi barang-barang meubel sendiri dengan mempekerjakan sang adik dan ditambah karyawan yang lainnya.

Kegiatan transaksi jual beli ini berjalan sangat lancar, ibu K sudah mempunyai banyak pelanggan dan bertambahnya barang pesanan yang dibuat. Seiring berjalannya waktu, usaha meubel tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ketahun dan sudah diketahui oleh banyak masyarakat.

Dalam kegiatan industrinya Meubel Nadia membeli meubel dari pengrajin lokal maupun pengrajin dari luar kota dan memproduksi pesanan berdasarkan pesanan dari pembeli dan juga menyediakan produk yang sudah jadi, bisa juga melayani desain sesuai permintaan pembeli. Meubel Nadia sendiri mendapatkan pesanan kurang lebih berjumlah 10 sampai 20 pesanan dalam satu

bulan. Dari pesanan tersebut berbeda-beda dalam pemesanannya seperti pesanan lemari pakaian, lemari tv, meja makan dan lainnya. Cara pembayaran yang dilakukan dengan sistem berbagai macam seperti, membayar uang muka terlebih dahulu, kredit dan lunas.

Modal yang dikeluarkan oleh ibu K dalam sebulan kurang lebih 15 juta dan Omset bersih yang didapat meubel Nadia dalam sebulan keuntungan bisa mencapai 15 juta perbulan bahkan bisa lebih jika orderan pesanan dan meubel yang sudah jadi semakin bertambah.

Produk yang dijual adalah berbagai perabotan lemari pakaian besar, lemari pakaian kecil, meja makan, meja kecil, tempat tidur, dan semua barang meubel sebagai barang kebutuhan rumah tangga. Salah satu produk yang paling diminati ialah lemari pakaian besar maupun kecil dan berbagai macam meja ataupun lemari.¹⁰⁷

d. Meubel Riadi

Sama seperti Meubel yang lain, Meubel Riadi juga merupakan sebuah industri rumah tangga yang bergerak dibidang pengolahan kayu, yaitu produksi dan penjualan meubel. Produk dari Meubel Riadi ini adalah berbagai jenis peralatan meubel keperluan rumah tangga.

Meubel Riadi sendiri berdiri pada tahun 2009, yang dimiliki oleh Bapak AS dan istrinya, yang berlokasi di Jl. Cristopel Mihing

¹⁰⁷ K, *Observasi* (Palangka Raya, 12 Juli 2020).

Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Meubel Riadi ini berawal dari sebuah keahlian dan pengalaman sang suami membuat peralatan meubel karena pernah bekerja dibidang pengolahan kayu atau meubel, karena adanya peluang usaha dibidang pengolahan kayu pada saat itu. Mereka memutuskan untuk memproduksi dan menjual sendiri barang-barang meubel.

Pada awal merintis usaha meubel ini, bapak AS menggunakan modal milik sendiri. Modal awal yang dikeluarkan senilai kurang lebih 4 juta yang digunakan untuk membeli bahan baku utama yaitu kayu, untuk peralatan mesinnya mereka tidak mengeluarkan modal lagi karena sang suami sudah mempunyai peralatan mesin sendiri saat bekerja dibidang pengolahan kayu atau meubel sebelumnya.

Usaha meubelnya ini berjalan sangat lancar, bapak AS sudah mempunyai banyak pelanggan dan bertambahnya barang pesanan yang dibuat. Seiring berjalannya waktu, usaha meubel tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ketahun dan sudah diketahui oleh banyak masyarakat. Meningkatnya perkembangan usaha di bidang meubel ini, membuat bapak AS berinisiatif untuk merekrut karyawan untuk membantu membuat meubel karena pesanan dari pembeli semakin banyak.

Dalam kegiatan industrinya Meubel Riadi memproduksi pesanan berdasarkan pesanan dari pembeli dan juga menyediakan

produk yang sudah jadi, bisa juga melayani desain sesuai permintaan pembeli. Meubel Riadi sendiri mendapatkan pesanan kurang lebih berjumlah 15 sampai 30 pesanan dalam satu bulan. Dari pesanan tersebut berbeda-beda dalam pemesanannya seperti pesanan lemari pakaian, lemari tv, meja makan dan lainnya. Cara pembayaran yang dilakukan dengan sistem berbagai macam seperti, membayar uang muka terlebih dahulu, kredit dan lunas.

Modal yang dikeluarkan oleh bapak AS dalam sebulan kurang lebih 15 juta dan Omset bersih yang didapat meubel Riadi dalam sebulan keuntungan bisa mencapai 20 juta perbulan bahkan bisa lebih jika orderan pesanan dan meubel yang sudah jadi semakin bertambah.

Produk yang dijual adalah berbagai perabotan lemari pakaian besar, lemari pakaian kecil, meja makan, meja kecil, tempat tidur, dan semua barang meubel sebagai barang kebutuhan rumah tangga. Salah satu produk yang paling diminati ialah lemari pakaian dan lemari hias.¹⁰⁸

¹⁰⁸ AS, *Observasi* (Palangka Raya, 12 Juli 2020).

B. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria pelaku usaha beragama Islam, lama berjualan lebih dari 1 tahun, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Peneliti menentukan beberapa pelaku usaha yaitu meubel ananda, meubel meyda, meubel nadia dan meubel riadi sebagai subjek dalam penelitian ini.

Peneliti juga menggali data dari pembeli selaku subjek penelitian, di mana sebelum melakukan wawancara peneliti menanyakan kepada responden pernah atau tidak melakukan pemesanan barang pada meubel yang sudah peneliti wawancarai. Peneliti menentukan dengan kriteria tertentu yang meliputi responden pernah memesan barang dan melakukan penundaan pembayaran pada meubel yang menjadi lokasi penelitian, beragama Islam, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini peneliti lakukan sebagai landasan agar informasi dan data yang digali dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang penting terkait penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan

pada industri meubel di Kota Palangka Raya ini. *Pertama*, penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan tersebut umumnya disebabkan oleh adanya kesulitan yang didapat oleh pembeli. *Kedua*, penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya ini relatif kurang lebih sama juga yaitu menyelesaikan dengan jalan perdamaian secara musyawarah yang hasilnya tergantung dari para pihak, seperti dibatalkan atau *direschedule*. Untuk pembeli yang tidak ada kabar sama sekali, penyelesaiannya yaitu dengan pembatalan dan tanggung resiko. Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggali data dengan teknik wawancara.

Data hasil wawancara peneliti sajikan menjadi tiga bagian sesuai rumusan masalah mengenai tanggapan penjual dan pembeli terhadap pertanyaan penelitian yang peneliti buat sebagai panduan penelitian. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap penjual atau pelaku usaha industri meubel atas nama inisial S, AS, K dan N dan pembeli yang melakukan penundaan pembayaran atas nama inisial AA, NW, MS dan ST di Kota Palangka Raya.

1. Mengapa Terjadi Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya.

a. Penjual 1

Nama Meubel : Meubel Ananda

Nama Pemilik : Ibu N

Lama Usaha : 5 Tahun

Responden pertama adalah ibu N selaku pemilik Meubel Ananda. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 21 Juli 2020 di Meubel Ananda pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai seberapa sering dalam satu bulan terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel Ananda. Berikut adalah jawaban dari Ibu N:

“Penundaan pembayaran tu kalo usaha meubel ni pasti ada pang, dalam sebulan tu bisa 3 sampai 5 kali bahkan bisa lebih. Misalnya pesanan lemari, perjanjiannya 2 minggu tuntung dan langsung dilunasi. Pas sudah tuntung, kami hubungi kadida respon.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Penundaan pembayaran barang pesanan di usaha khususnya usaha meubel ini pasti ada, dalam satu bulan itu bisa 3 sampai 5 kali bahkan bisa lebih. Misalnya pesanan meubel lemari, perjanjiannya diawal selesai dalam 2 minggu dan langsung dilunasi. Tetapi saat barang pesanan selesai, kami hubungi tidak ada respon.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Ananda. Berikut adalah jawaban dari ibu N:

“Biasanya karena belum ada duitnya pang. Soalnya pas mesan kan duitnya ada, pesanan tu tuntung 2 minggu hanyar dilunasi. Sekalinya pas selang 2 minggu tu, duitnya terpakai jer. Nah jadinya tetunda ai pelunasan barang ni.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Biasanya dikarenakan belum ada uangnya. Soalnya kan saat awal pemesanan uangnya ada, pesanan itu selesai dalam waktu 2 minggu dan baru dilunasi. Berselang waktu 2 minggu itu ternyata uangnya terpakai, sehingga terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan.”

b. Penjual 2

Nama Meubel : Meubel Meyda

Nama Pemilik : Bapak S

Lama Usaha : 15 Tahun

Responden kedua adalah bapak S selaku pemilik Meubel Meyda. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 21 Juli 2020 di Meubel Meyda pada pukul 15.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai seberapa sering dalam satu bulan terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel Meyda. Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Penundaan pembayaran tu di sambat rancak kada jua, di sambat jarang kada jua, tergantung lah. Tapi pernah dalam sebulan tu bisa sampai parak 10 kali pemesan yang menunda pembayaran ni.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Penundaan pembayaran itu disebut sering tidak, disebut jarang juga tidak, tergantung. Tetapi pernah dalam satu bulan itu bisa mencapai 10 kali pemesan yang melakukan penundaan pembayaran baranh pesanan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Meyda. Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Penyebabnya yang paling rancak tu lah gaji belum masuk jar atau belum dapat duit. Ada jua duitnya tepakai gasan keperluan yang lain jer, macam-macam ai pang.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Penyebab yang paling sering itu gaji belum masuk atau belum dapat uang. Ada juga yang uangnya terpakai untuk keperluan lain, bermacam-macamlah.”

c. Penjual 3

Nama Meubel : Meubel Nadia

Nama Pemilik : Ibu K

Lama Usaha : 2 Tahun

Responden ketiga adalah ibu K selaku pemilik Meubel Nadia. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 Juli 2020 di Meubel Nadia pada pukul 15.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai seberapa sering dalam satu bulan terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel Nadia. Berikut adalah jawaban dari ibu K:

“Penundaan pembayaran tu ada pang bisa sampai 5 kali dalam sebulan, soalnya kada menentu. Misalnya pas pemesanan di awal tu bejanji seminggu, pas seminggu tuntung barangnya. Pas dihubungi kada kawa, itu bisa sampai beberapa hari atau minggu.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Penundaan pembayaran itu dalam sebulan bisa ada mencapai 5 kali, soalnya tidak menentu. Misalnya pada saat awal pemesanan janji satu minggu, sudah satu minggu selesai barangnya. Saat dihubungi tidak bisa, itu bisa sampai beberapa hari atau minggu.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Nadia. Berikut adalah jawaban dari ibu K:

“Penyebabnya tu kurang tau pang, tapi biasanya tu alasannya kaya gaji belum turun, ada keperluan lain jar dan lain-lain ai. Yang kaya itu kami maklumi ai pang biar rugi, soalnya kami kada bisa memaksakan jua.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Penyebabnya itu kurang tau juga, tetapi biasanya alasannya seperti gaji belum diterima, ada keperluan yang lain dan lain sebagainya. Yang seperti itu kami maklumi saja walaupun mendapat kerugian, karena kami tidak bisa memaksakan juga.”

d. Penjual 4

Nama Meubel : Meubel Riadi

Nama Pemilik : Bapak AS

Lama Usaha : 11 Tahun

Responden keempat adalah bapak AS selaku pemilik Meubel Riadi. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 20 Juli 2020 di Meubel Riadi pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 13.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai seberapa sering dalam satu bulan terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada meubel Riadi. Berikut adalah jawaban dari bapak AS:

“Kada jua pang sering, tapi ya bisa 4 sampai 5 kali bisa lebih adalah kalo orang yang menunda pembayaran tu.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak terlalu sering, tetapi ya bisa mencapai 4 sampai 5 kali bahkan lebih adalah pembeli yang melakukan penundaan pembayaran.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Riadi. Berikut adalah jawaban dari bapak AS:

“Penyebabnya tu biasanya karena balum dapat duit atau karena ada keperluan lain, pas handak melunasi kada cukup duitnya.”

Jadinya ditunda dulu pembayaran barang pesanan nih, biasanya kaya itu pang alasan pembeli.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Penyebabnya itu biasanya karena belum mendapatkan uang atau karena ada keperluan lain, saat mau melunasi uangnya tidak cukup. Jadi ditunda dulu pembayaran barang pesannya, biasanya seperti itu alasan pembeli.”

e. Pembeli 1

Nama : AA

Usia : 44 Tahun

Pekerjaan : Surveyor Perkebunan Sawit

Agama : Islam

Responden kelima adalah bapak AA, peneliti melakukan wawancara langsung secara online pada tanggal 9 September 2020 menggunakan aplikasi WhatsApp. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai berapa kali responden pernah melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari bapak AA:

“Dua kali mas.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apa yang menyebabkan responden sampai melakukan penundaan pembayaran barang pesanan. Berikut adalah jawaban dari bapak AA:

“Penyebab jadi sampai saya dua kali menunda pembayaran itu karena saya sering ke luar daerah mas, kebetulan disana susah sinyal, jadi saat penjual menghubungi ga bisa. Keluarga juga

masih dirumah yang lama di Kobar, soalnya disini rumah baru jadi cuman saya aja yang tinggal.”¹⁰⁹

f. Pembeli 2

Nama : NW
Usia : 28 Tahun
Pekerjaan : Penjual Pakaian
Agama : Islam

Responden keenam adalah ibu NW, peneliti melakukan wawancara langsung secara online pada tanggal 10 September 2020 menggunakan aplikasi WhatsApp. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai berapa kali responden pernah melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu NW:

“Pernahnya cuman satu kali aja.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apa yang menyebabkan responden sampai melakukan penundaan pembayaran barang pesanan. Berikut adalah jawaban dari ibu NW:

“Penyebabnya kemaren tu karena pesanan ku ternyata selesainya pas jualan lagi sepi, gara-gara yang berita heboh pasar besar banyak yang kena covid itu. Nah pas itu jua barang baju dan lain-lain datang jua, jadi duit tabungan dengan duit modal tu terpakai gasan membayari itu.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Penyebabnya kemaren itu karena pesanan saya ternyata selesainya disaat berjualan lagi sepi, gara-gara berita heboh pasar

¹⁰⁹ AA, Wawancara (Palangka Raya, 9 September 2020).

besar banyak yang positif Covid. Ternyata saat itu juga barang baju dan lain-lain datang juga, jadi uang tabungan dan uang modal terpakai untuk membayar itu.”¹¹⁰

g. Pembeli 3

Nama : MS

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan : Warung Makan

Agama : Islam

Responden ketujuh adalah ibu MS, peneliti melakukan wawancara langsung secara online pada tanggal 11 September 2020 menggunakan aplikasi WhatsApp. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai berapa kali responden pernah melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu MS:

“Sekali semalam tu ja ding ai.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sekali kemaren itu aja dik.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apa yang menyebabkan responden sampai melakukan penundaan pembayaran barang pesanan. Berikut adalah jawaban dari ibu MS:

“Jadi tetunda pembayaran semalam tu gara-gara tepeimbai pas pesanan meja kursi tu tuntung, sekalinya kayu dan semen gasan meulah warung itu tu kehabisan. Jadi duitnya tu sementara ku

¹¹⁰ NW, Wawancara (Palangka Raya, 10 September 2020).

belikan gasan kayu semen tu, soalnyaan warungnya belum tuntung jua jadinya kada kawa juakan.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Jadi tertunda pembayaran kemaren itu gara-gara berbarengan pesanan meja dan kursi itu selesai, ternyata kayu dan semen untuk membuat warung itu kehabisan. Jadi uangnya itu sementara saya belikan ke semen dan kayu itu, soalnyaan warungnya belum selesai jadi tidak bisa jugakan diambil.”¹¹¹

h. Pembeli 4

Nama : ST

Usia : 34 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Responden kedelapan adalah ibu ST, peneliti melakukan wawancara langsung secara online pada tanggal 10 September 2020 menggunakan aplikasi WhatsApp. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai berapa kali responden pernah melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu ST:

“Baru pernah satu kali aja mas.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apa yang menyebabkan responden sampai melakukan penundaan pembayaran barang pesanan. Berikut adalah jawaban dari ibu ST:

“Karena kemaren itu ga disangka anak terkena usus buntu mas, tabungan terpakai untuk itu mas terus kalo harus menjual

¹¹¹ MS, Wawancara (Palangka Raya, 11 September 2020).

perhiasankan juga rugikan mas soalnya kemaren itu harganya turun. Jadinya saya tertunda melakukan pembayarannya mas dan sampai suami gajihan.”¹¹²

2. Apa Saja Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya.

a. Penjual 1

Nama Meubel : Meubel Ananda

Nama Pemilik : Ibu N

Lama Usaha : 5 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai kerugian yang didapat karena penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Ananda. Berikut adalah jawaban dari ibu N:

“Namanya beusaha ni pasti ada untung ruginya pang iya kalo, apalagi kan meubel ni lain kebutuhan utama orang. Jadi dikesampingkan orang dulu gasan yang lebih penting. Tapi mun bagi kami yang bejualan ni, pasti rugi pang. Salah satunya rugi duit modal, ya ngalih ai memutar duit modalnya kalo duitnya tetahan.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Namanya berusaha ini pasti ada untung dan ruginya, apalagi usaha meubel ini bukan menjadi kebutuhan utama. Jadi dikesampingkan orang terlebih dahulu untuk kebutuhan yang lebih penting. Tapi untuk kami yang berjualan pasti rugi, salah satunya rugi dalam hal modal karena perputaran uangnya tertahan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah penundaan pembayaran yang dilakukan pemesan mempengaruhi

¹¹² ST, Wawancara (Palangka Raya, 10 September 2020).

omset atau proses produksi pada Meubel Ananda. Berikut adalah jawaban dari Ibu N:

“Kalo dari proses produksi kada terlalu mempengaruhi pang, tapi kalo dari segi omset mempengaruhi. Apalagi penundaan pembayaran ini menyangkut barang yang harganya diatas 5 juta dan Rata-rata pulang yang tertunda pembayarannya ni yang harga pesanannya diatas 3-5 juta.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalau dari proses produksi tidak terlalu mempengaruhi, tapi kalau dari segi omset mempengaruhi. Apalagi penundaan pembayaran ini menyangkut barang yang harganya di atas 5 juta dan rata-ratanya lagi yang tertunda pembayarannya ini yang harga pesanannya diatas 3-5 juta.”

b. Penjual 2

Nama Meubel : Meubel Meyda

Nama Pemilik : Bapak S

Lama Usaha : 15 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai kerugian yang didapat karena penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Meyda. Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Kerugian yang didapat itu pasti ada, ngarannya bejualan ni kan modalnya teputar-putar ja. Jadi mun ada yang menunda pembayaran tu, teganggu ai pang karna rugi. Kaya rugi waktu, rugi modal, membuat barang meubel yang lain jadi telambat jua.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kerugian yang didapat pasti ada, namanya bejualan ini kan modalnya berputar. Jadi kalau ada pembeli yang melakukan penundaan pembayaran, terganggu karena mendapat kerugian. Seperti kerugian waktu, kerugian modal dan membuat barang pesanan yang lain juga terlambat.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah penundaan pembayaran yang dilakukan pemesan mempengaruhi omset atau proses produksi pada Meubel Meyda. Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Mempengaruhi atau kada mempengaruhi omset dan proses produksi tu tergantung dari waktu penyelesaiannya penundaan tu, kalo penyelesaiannya setumat ja kada mempengaruhi pang, nah tapi mun penyelesaiannya tu lawas yang sampai berminggu-minggu, pasti mempengaruhi itu. Apalagi harga pesanannya jutaan.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Mempengaruhi atau tidak mempengaruhi omset dan proses produksi itu tergantung dari waktu penyelesaiannya penundaan itu, kalau penyelesaiannya sebentar saja tidak mempengaruhi, tapi kalau penyelesaiannya itu lama yang sampai berminggu-minggu, pasti mempengaruhi. Apalagi harga pesanannya jutaan rupiah.”

c. Penjual 3

Nama Meubel : Meubel Nadia

Nama Pemilik : Ibu K

Lama Usaha : 2 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai kerugian yang didapat karena penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Nadia.

Berikut adalah jawaban dari ibu K:

“Kerugian tu pasti ada pang, yang pasti dulu waktu pang. Karna menuntung akan pesanan tu kada tuntung sehari 2 hari jadinya tetunda gawian yang lain. Yang awalnya untung, karena tetunda gawian yang lain jadi malah rugi. Habis itu rugi modal kan meulah pesanan tu perlu modal gasan nukar kayunya dan lain-lain, belum lagi upah tukang.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kerugian itu pasti ada, yang pasti kerugian waktu. Karena menyelesaikan meubel pesanan itu tidak selesai sehari atau dua hari saja membuat tertundanya pekerjaan yang lain. Yang awalnya untung malah mendapat kerugian. Setelah itu kerugian dari sisi modal, untuk membuat barang meubel itu kan perlu bahan-bahan seperti kayu dan lain-lain belum lagi untuk upah tukang.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah penundaan pembayaran yang dilakukan pemesan mempengaruhi omset atau proses produksi pada Meubel Nadia. Berikut adalah jawaban dari Ibu K:

“Mempengaruhi pang ding ai, soalnya kan meulah pengeluaran dan pemasukan tu kada seimbang jadinya. Tapi mun pesanannya dibawah sejuta kada tapi mempengaruhi pang.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Mempengaruhi lah dik, soalnya kan membuat pengeluaran dan pemasukan itu tidak seimbang jadinya. Tapi kalau pesanannya dibawah satu juta tidak terlalu mempengaruhi lah.”

d. Penjual 4

Nama Meubel : Meubel Riadi

Nama Pemilik : Bapak AS

Lama Usaha : 11 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai kerugian yang didapat karena penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Riadi.

Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Kerugian pasti ada pang, ya kami usahakan ai sebisa mungkin biar kada rugi-rugi banar. Biasanya kalo emang kadida kejelasan lagi sudah atau kada jadi, dp itu ai yang kami pakai gasan menutupi kerugian walau kada bisa menutupi sepenuhnya.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kerugian itu pasti ada, tetapi kami usahakan sebisanya agar tidak rugi banyak. Biasanya kalau tidak ada kejelasan lagi atau tidak jadi, uang muka itu yang kami gunakan untuk menutupi kerugian walaupun tidak bisa menutupi semuanya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah penundaan pembayaran yang dilakukan pemesan mempengaruhi omset atau proses produksi pada Meubel Riadi. Berikut adalah jawaban dari bapak AS:

“Amun mempengaruhi atau kada tu tergantung harga pesanannya dan berapa banyak yang menunda, amun harganya jutaan pasti mempengaruhi tu lawan jua biar harganya tujuh ratus lapan ratusan tapi amun yang menunda orang betiga beempat pasti mempengaruhi. Tapi kalo harga yang dibawah sejuta tu jarang pang tertunda pembayarannya.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalau mempengaruhi atau tidak itu tergantung harga pesanannya dan berapa banyak yang menunda, kalau harganya jutaan rupiah pasti mempengaruhi dengan juga walaupun harganya tujuh ratus delapan ratusan tapi kalau menunda orang bertiga atau berempat pasti mempengaruhi. Tapi kalau harga yang di bawah satu juta itu jarang tertunda pembayarannya.”

e. Pembeli 1

Nama : AA

Usia : 44 Tahun

Pekerjaan : Surveyor Perkebunan Sawit

Agama : Islam

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai berapa lama responden melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada

toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari bapak AA:

“Yang pertama itu sekitar 1 minggu mas, terus untuk yang kedua itu 2 mingguan lebih.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah responden mengetahui penundaan pembayaran batang pesanan yang dilakukan itu bisa membuat penjual mendapat kerugian. Berikut adalah jawaban bapak AA:

“Tau mas, apalagi kemaren itukan saya memesan lemari baju yang lumayan besar beberapa buah juga dan harganya ya lebih 5 jutaan lah. Makanya setelah saya balik langsung saya lunasi mas.”

i. Pembeli 2

Nama : NW

Usia : 28 Tahun

Pekerjaan : Penjual Pakaian

Agama : Islam

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai berapa lama responden melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu NW:

“Sekitar satu mingguan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah responden mengetahui penundaan pembayaran batang pesanan yang

dilakukan itu bisa membuat penjual mendapat kerugian. Berikut adalah jawaban dari ibu NW:

“Tau, apalagikan sesama pedagang ini yang untungnya terputar untuk modal aja. Jadi kalau untuk itu tau lah.”

j. Pembeli 3

Nama : MS

Usia : 32 Tahun

Pekerjaan : Warung Makan

Agama : Islam

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai berapa lama responden melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu MS:

“Semalam tu 5 harian ding ai rasanya kalo kada salah.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kemaren itu sekitar 5 harian dik rasanya kalo tidak salah,”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah responden mengetahui penundaan pembayaran batang pesanan yang dilakukan itu bisa membuat penjual mendapat kerugian. Berikut adalah jawaban dari ibu MS:

“Tahu ding, makanya pas pesanan tu tuntung langsung kucarikan duitnya walau dapatnya pas beberapa hari.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tau dik, makanya saat pesanan tu selesai langsung saya carikan uang walaupun dapatnya setelah sudah lewat beberapa hari.”

k. Pembeli 4

Nama : ST

Usia : 34 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan mengenai berapa lama responden melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu ST:

“Kemaren itu karena nunggu gaji suamikan sekitar 3 minggu mas.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah responden mengetahui penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan itu bisa membuat penjual mendapat kerugian. Berikut adalah jawaban dari ibu ST:

“Tau mas, tapikan namanya juga musibahkan ya mau gimana lagi. Tapi menurut saya ga rugi-rugi banget, soalnya harga pesanan saya itu sekitar dua jutaan lebih ja, ga terlalu mahal.”

3. Bagaimana Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran

Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya.

a. Penjual 1

Nama Meubel : Meubel Ananda

Nama Pemilik : Ibu N

Lama Usaha : 5 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai cara penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Ananda.

Berikut adalah jawaban dari ibu N:

“Penyelesaiannya tu, kalo orang yang emang ada musibah atau ada apa kan. Biasanya mengabari pang bahwa tetunda pelunasan barang pesanan ni karena alasan tertentu. Iya kami maklumi ai pang, walau kami rugi jua. Bermusyawarah ai dengan si pembeli nih, biar kada terlalu rugi dan dapat kepastian dilunasinya. Yang ngalih tu yang kadida kabar, kalo kadida kabar sama sekali, kami jual lagi ai barang pesanannya ni.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

*“Penyelesaiannya itu, kalau orang benar-benar terkena musibah atau apapun. Biasanya memberikan kabar bahwa menunda pembayaran barang pesanannya terlebih dahulu karena alasan tertentu. Kami maklumi saja walaupun kami mendapat kerugian juga. Bermusyawarah dengan si pembeli ini, agar tidak terlalu rugi dan dapat kepastian waktu pelunasannya. Yang susah itu apabila tidak ada kabar, kalau tidak ada kabar sama sekali, kami pasarkan lagi barang pesanannya ini.”*¹¹³

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apabila ada pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dan tidak ada kabar, berapa lama batas waktu yang ditentukan sebelum memutuskan perjanjian jual beli pada Meubel Ananda. Berikut adalah jawaban dari ibu N:

“Batas waktu yang dibari kalo pina ada kabar dari pembeli nih sebelum memutus akannya itu sebulan pang.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

¹¹³ N, Wawancara (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

“Batas waktunya yang diberikan kalau siapa tau ada kabar dari pembeli sebelum memutuskan itu satu bulan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah pernah dan kenapa disaat sudah diselesaikan dengan musyawarah ternyata tidak jadi membeli barang pesanannya pada Meubel Ananda. Berikut adalah jawaban dari ibu N:

“Pernah. Karena duitnya terpakai gasan bininya yang harus melahirkan dengan operasi sesar.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pernah. Karena uangnya terpakai untuk istrinya yang harus melahirkan operasi sesar.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah ada barang pesanan yang tidak diambil oleh pemesan pada Meubel Ananda. Berikut adalah jawaban dari ibu N:

“Iih ada barang pesanan yang kada diambil.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Iya ada barang pesanan yang tidak diambil.”

Selanjutnya pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan mengenai apakah ada pembeli yang melakukan komplek karena barang pesanannya dijual ke orang lain saat sudah melewati batas waktu pelunasan jual beli pada Meubel Ananda. Berikut adalah jawaban dari ibu N:

“Sampai ini baluman ada pang masih, mungkin si pembeli emang kada jadi nukar kalo.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sampai saat ini masih belum ada, mungkin si pembeli emang tidak jadi membeli.”¹¹⁴

b. Penjual 2

Nama Meubel : Meubel Meyda

Nama Pemilik : Bapak S

Lama Usaha : 15 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai cara penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Meyda.

Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Menyelesaikan penundaan pembayaran ni, kalo orangnya bujur-bujur ada kendala dalam melunasinya pembayaran ini, pas dihubungi tu menjelaskan alasannya, kami selesaikan dengan musyawarah. Tapi kalo dihubungi kada meangkat atau kadida kabar sama sekali, barangnya kami jual kelain gasan menutupi kerugian nih.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menyelesaikan penundaan pembayaran ini, kalau pembeli benar-benar ada kendala dalam melunasi pembayaran ini, saat dihubungi menjelaskan alasannya, dan kami selesaikan dengan cara musyawarah. Tapi kalau dihubungi tidak ada respon atau tidak ada kabar sama sekali, barang pesannya kami jual ke orang lain untuk menutupi kerugian.”¹¹⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apabila ada pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dan tidak ada kabar, berapa lama batas waktu yang ditentukan sebelum memutuskan perjanjian jual beli pada Meubel Meyda. Berikut adalah jawaban dari bapak S:

¹¹⁴ N, Wawancara (Palangka Raya, 1 September 2020).

¹¹⁵ S, Wawancara (Palangka Raya, 21 Juli 2020).

“Paling lawas waktunya itu sebulan pang, dihitung mulai pas terakhir kali mehubungi.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Paling lama waktunya itu satu bulan, dihitung mulai terakhir kali menghubungi.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah pernah dan kenapa disaat sudah diselesaikan dengan musyawarah ternyata tidak jadi membeli barang pesanannya pada Meubel Meyda Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Pernah. Soalnya yang nukar ni orang yang bedagang sayur dipasar, pas awal memesan tu masih rami ja jer, sekalnya pas awal-awal corona ada positif dipalangka nih, langsung sunyi jer bejualan. Jadinya kada jadi nukar karena bejualan sunyi dan tanggungan banyak jer.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pernah. Soalnya yang membeli ini orang yang berdagang sayur di pasar, saat awal memesan itu masih rame aja katanya, ternyata saat awal-awal corona ada positif di palangka raya ini, langsung sepi berjualan. Jadinya tidak jadi beli karena berjualan sepi dan tanggungan banyak katanya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah ada barang pesanan yang tidak diambil oleh pemesan pada Meubel Meyda Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Iih ada.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Iya ada.”

Selanjutnya pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan mengenai apakah ada pembeli yang melakukan komplek karena barang pesanannya dijual ke orang lain saat sudah melewati batas

waktu pelunasan jual beli pada Meubel Meyda. Berikut adalah jawaban dari bapak S:

“Kalo komplek masalah barang pesannya dijual lagi ke lain itu belum ada pang.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalau komplek masalah barang pesannya yang dijual kembali ke orang lain belum ada.”¹¹⁶

c. Penjual 3

Nama Meubel : Meubel Nadia

Nama Pemilik : Ibu K

Lama Usaha : 2 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai cara penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Nadia. Berikut adalah jawaban dari ibu K:

“Menyelesaikannya tu, meutamakan baik-baik pang bepanderaan dengan si pembeli nih. Kami hubungi beberapa kali sampai ada kabar, kalo sampai berminggu-minggu kadida kabar, barangnya ni kami jual kelain kalo ada yang handak.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menyelesaikannya itu, mengutamakan secara baik-baik dengan bermusyawarah dengan pembeli. Kami coba hubungi beberapa kali sampai ada kabar, kalau berminggu-minggu tidak ada kabar, barang meubel pesannya ini kami pasarkan ke orang lain kalau ada yang mau.”¹¹⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apabila ada pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dan tidak ada

¹¹⁶ S, Wawancara (Palangka Raya, 1 September 2020).

¹¹⁷ K, Wawancara (Palangka Raya, 20 Juli 2020).

kabar, berapa lama batas waktu yang ditentukan sebelum memutuskan perjanjian jual beli pada Meubel Nadia. Berikut adalah jawaban dari ibu K:

“Batas waktunya itu sebulan mulai pas barang pesannya sudah tuntung.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Batas waktunya itu satu bulan mulai saat barang pesannya sudah selesai.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah pernah dan kenapa disaat sudah diselesaikan dengan musyawarah ternyata tidak jadi membeli barang pesannya pada Meubel Nadia. Berikut adalah jawaban dari ibu K:

“Pernah. Karena pembeli ni rumahnya terkena musibah kebakaran yang di jalan riau dahulu.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pernah. Karena pembeli ini rumahnya terkena musibah kebakaran yang di jalan riau dahulu.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah ada barang pesanan yang tidak diambil oleh pemesan pada Meubel Nadia. Berikut adalah jawaban dari ibu K:

“Iih pernah ada barang yang kada diambil.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Iya pernah ada barang yang tidak diambil.”

Selanjutnya pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan mengenai apakah ada pembeli yang melakukan komplek karena barang pesannya dijual ke orang lain saat sudah melewati batas

waktu pelunasan jual beli pada Meubel Nadia. Berikut adalah jawaban dari ibu K:

“Sampai ini kadida pang masih.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Sampai saat ini masih tidak ada.”¹¹⁸

d. Penjual 4

Nama Meubel : Meubel Riadi

Nama Pemilik : Bapak AS

Lama Usaha : 11 Tahun

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai cara penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan pada Meubel Riadi. Berikut adalah jawaban dari bapak AS:

“Penyelesaiannya tu ya secara baik-baik ja pang, kami hubungi dulu sampai ada kejelasan. Kalo pembeli ini membari kejelasan, kami selesaikan dengan musyawarah ja sampai dengan selesai. Tapi kalonya emang kadida kejelasan sama sekali, kami putuskan secara sepihak bahwa inya kada jadi nukar dan jual belinya kami batalkan. Barang pesanan inya tadi tu kami jual beasa.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Penyelesaiannya itu kami selesaikan secara baik-baik, kami hubungi dulu sampai ada kejelasan. Kalau pembeli memberi kejelasan, kami selesaikan dengan jalan musyawarah sampai permasalahan selesai. Tetapi kalau tidak ada kejelasan sama sekali, kami selesaikan secara sepihak bahwa pembeli tidak jadi membeli dan jual belinya kami batalkan. Barang pesannya pun kami jual lagi.”¹¹⁹

¹¹⁸ K, Wawancara (Palangka Raya, 1 September 2020).

¹¹⁹ AS, Wawancara (Palangka Raya, 20 Juli 2020).

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apabila ada pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dan tidak ada kabar, berapa lama batas waktu yang ditentukan sebelum memutuskan perjanjian jual beli pada Meubel Riadi. Berikut adalah jawaban dari bapak AS:

“Waktunya itu paling lawas sebulan.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Waktunya itu paling lama satu bulan.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah pernah dan kenapa disaat sudah diselesaikan dengan musyawarah ternyata tidak jadi membeli barang pesanannya pada Meubel Riadi. Berikut adalah jawaban dari bapak AS:

“Pernah. Karena kada disangka-sangka oleh pemesan nih orang tuanya terkena musibah dan harus membiayai masuk rumah sakit di banjarmasin.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Pernah. Karena tidak disangka-sangka oleh pemesan ini orang tuanya terkena musibah dan harus membiayai masuk rumah sakit di Banjarmasin.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah ada barang pesanan yang tidak diambil oleh pemesan pada Meubel Riadi. Berikut adalah jawaban dari bapak AS:

“Inggih ada barang yang kada diambil sama sekali oleh pemesan.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Iya ada barang yang tidak diambil sama sekali oleh pemesan.”

Selanjutnya pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan mengenai apakah ada pembeli yang melakukan komplek karena barang pesannya dijual ke orang lain saat sudah melewati batas waktu pelunasan jual beli pada Meubel Riadi. Berikut adalah jawaban dari bapak AS:

“Kadida pang, karena sudah kadida kabar dari awal.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tidak ada, karena sudah tidak ada kabar dari awal.”¹²⁰

f. Pembeli 1

Nama : AA

Usia : 44 Tahun

Pekerjaan : Surveyor Perkebunan Sawit

Agama : Islam

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh responden saat melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari bapak AA:

“Yang saya lakukan saat menunda itu mas. Setelah saya sudah balik dan sampai ke Palangka Raya lagi, langsung saya ke toko meubelnya mas, terus saya jelaskan kenapa saya menunda. Sekalian langsung melunasinya mas.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah saat responden melakukan penundaan pembayaran barang pesanan,

¹²⁰ AS, *Wawancara* (Palangka Raya, 1 September 2020).

responden tetap melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian barang pesanan tersebut. Berikut adalah jawaban bapak AA:

“Saya tetap melanjutkan mas, karena itukan kebutuhan buat rumah baru juga.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana menurut pendapat responden penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan oleh penjual. Berikut adalah jawaban bapak AA:

“Penyelesaian yang dilakukan oleh penjual sangat baik mas menurut saya, mereka mengutamakan dengan cara baik-baik dan selalu diselesaikan dengan baik-baik juga, jadinya tidak ada yang rugi antara saya dan penjual mas. Contohnya sayakan pernah dua kali menunda, respon mereka sangat bagus dan selalu melayani seperti baru pertama kali beli mas.”

g. Pembeli 2

Nama : NW
Usia : 28 Tahun
Pekerjaan : Penjual Pakaian
Agama : Islam

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh responden saat melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu NW:

“Semalam tu pas ditelpon penjualnya lo bahwa pesanan nih sudah tuntung, langsung aku bepadah disitu lawan penjualnya nih

bahwa aku kada kawa melunasinya dulu pas hari itu. aku minta waktu sekitar satu mingguan lah gasan melunasinya tu.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kemaren itukan ditelpon penjualnya bahwa pesanan ini sudah selesai, langsung saya bilang disitu sama penjualnya ini bahwa saya tidak bisa melunasinya pada hari itu juga. Saya minta waktu sekitar satu mingguan lah untuk melunasinya itu.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah saat responden melakukan penundaan pembayaran barang pesanan, responden tetap melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian barang pesanan tersebut. Berikut adalah jawaban ibu NW:

“Tetap melanjutkan aku semalam, makanya semalam minta waktu dulu gasan melunasinya.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Tetap melanjutkan saya kemaren, makanya kemaren meminta waktu dulu untuk melunasinya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana menurut pendapat responden penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan oleh penjual. Berikut adalah jawaban ibu NW:

“Semalam penyelesaiannya tu, penjualnya kada memaksa harus dilunasi hari itu juga. Dan amun meminta waktu gasan pelunasan dibari penjualnya ja. Bagus pang itu menurut ku, diselesaikan dengan musyawarahlah intinya, asal kita yang nukar ni bepadah jujur dengan penjualnya itu. Jadi kita pembeli nyaman penjualnya nyaman jua.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kemaren itu penyelesaiannya, penjualnya tidak memaksa harus dilunasi hari itu juga. Dan kalau meminta waktu untuk pelunasan diberikan saja oleh penjualnya. Bagus sih itu menurut saya, diselesaikan dengan musyawarah lah intinya, asal kita yang beli

ini mengasihtahukan dengan jujur sama penjualnya itu. Jadi kita pembeli nyaman penjual nyaman juga.”

h. Pembeli 3

Nama : MS
 Usia : 32 Tahun
 Pekerjaan : Warung Makan
 Agama : Islam

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh responden saat melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu MS:

“Pas aku menunda tu kan ditelpon penjual nih, jadinya disitu aku jelaskan. Bahwa aku menunda karena alasan yang kaya kupadahi diawal tadi, jadi dari awal penjual sudah tahu aku nih menunda dan minta waktu lagi untuk pelunasannya”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Saat saya menunda itulan ditelpon penjual, jadinya disitu saya jelaskan. Bahwa saya menunda kerena alasan yang seperti saya jelaskan diawal tadi, jadi dari awal penjual sudah mengetahui saya ini menunda dan meminta waktu lagi untuk pelunasannya.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah saat responden melakukan penundaan pembayaran barang pesanan, responden tetap melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian barang pesanan tersebut. Berikut adalah jawaban ibu MS:

“Mun aku semalam tetap melanjutkan ding, soalnya kan kada nyaman jua aku lawan penjual lemari tuh, aku sudah memesan timbul kada jadi nukar.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kalau saya kemaren tetap melanjutkan dik, soalnya tidak enak juga saya sama penjual meubel itu, saya sudah memesan malah tidak jadi beli.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana menurut pendapat responden penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan oleh penjual. Berikut adalah jawaban ibu MS:

“Menurut aku lah penyelesaian semalam tu bagus, penjualnya menerima ja alasan aku jadi menunda tu dan buhannya membari ja waktu pelunasannya tu. Ya intinya mengutamakan supaya kadida yang rugi lah.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Menurut saya penyelesaiannya kemaren itu bagus, penjualnya mau menerima aja alasan saya jadi menunda itu dan mereka memberikan juga waktu pelunasannya itu. Ya intinya mengutamakan agar tidak ada yang rugi lah.”

i. Pembeli 4

Nama : ST

Usia : 34 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan mengenai apa yang dilakukan oleh responden saat melakukan penundaan pembayaran barang pesanan pada toko meubel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Berikut adalah jawaban dari ibu ST:

“Kemaren itu mas, pas belum bisa bayar barang pesanan tepat waktu tu, langsung saya jelaskan mas kepenjualnya bahwa anak saya kena usus buntu dan duitnya tu terpakai untuk operasinya. Terus saya minta waktu juga untuk melunasinya pas suami saya gajihan nanti.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah saat responden melakukan penundaan pembayaran barang pesanan, responden tetap melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian barang pesanan tersebut. Berikut adalah jawaban ibu ST:

“Kemaren tetap jadi mas saya beli.”

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana menurut pendapat responden penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan oleh penjual. Berikut adalah jawaban ibu ST:

“Bagus mas respon penjualnya menurut saya, mereka memaklumi aja karena ga bisa dipaksakan juga kata mereka dan mereka mau menerima juga pas saya minta waktu dulu untuk melunasinya mas. Biar sama-sama enak kata mereka, mereka dapat duit pesanannya saya dapat barang saya mas.”

Tabel 3
Jual Beli Yang Menggunakan Uang Muka Atau Tidak

No.	Penjual dan Pembeli	Pemesanan dengan uang muka atau tidak
1.	Meubel Ananda dan Pembeli 1 (AA)	Dengan uang muka
2.	Meubel Meyda dan Pembeli 2 (NW)	Dengan uang muka
3.	Meubel Nadia dan Pembeli 3 (MS)	Dengan uang muka
4.	Meubel Riadi dan Pembeli 4 (ST)	Dengan uang muka

Tabel 4
Penyebab dan Cara Penyelesaian Masalah

No.	Nama	Penyebab Masalah	Cara Penyelesaian
1.	Meubel Ananda	Saat barang pesanan selesai lagi berada diluar kota dan uangnya terpakai untuk kebutuhan lain (<i>Force Majeure</i>)	- Diputuskan sepihak, barang pesanan dijual dan uang panjar tidak bisa diambil kembali - <i>Rescheduling</i> pembayaran (Pembeli AA)
2.	Meubel Meyda	Gaji belum masuk, belum dapat uang dan terpakai untuk keperluan lain (<i>Force Majeure</i>)	- Diputuskan sepihak, barang pesanan dijual dan uang panjar tidak bisa diambil kembali - <i>Rescheduling</i> pembayaran (Pembeli NW)
3.	Meubel Nadia	Gaji belum masuk dan terpakai untuk keperluan lain (<i>Force Majeure</i>)	- Diputuskan sepihak, barang pesanan dijual dan uang panjar tidak bisa diambil kembali - <i>Rescheduling</i> pembayaran (Pembeli MS)
4.	Meubel Riadi	Terkena musibah, belum dapat uang dan dan terpakai untuk keperluan lain (<i>Force Majeure</i>)	- Diputuskan sepihak, barang pesanan dijual dan uang panjar tidak bisa diambil kembali - <i>Rescheduling</i> pembayaran (Pembeli ST)

C. Analisis

Pembahasan tentang penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi tiga bagian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama*, mengapa terjadi penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya. *Kedua*, apa saja kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya. *Ketiga*, bagaimana penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia. Adapun uraian analisis yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penyebab Terjadi Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya

Jual beli pesanan adalah perjanjian/kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Penjual menerima barang pesanan dari pembeli, lalu penjual berusaha melalui orang lain untuk membuat barang pesanan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli. Kedua belah pihak sepakat bersepakat atas harga barang pesanan tersebut serta sistem pembayaran yang dilakukan bayar dimuka atau ditangguhkan sampai barang pesanan tersebut selesai dibuatkan. Para pemilik meubel yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan ataupun intimidasi,

semuanya dilakukan berdasarkan kesadaran diri, transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dilakukan atas kesepakatan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut pemilik meubel riadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran biasanya karena pembeli belum memiliki uang atau karena ada pembayaran keperluan lain.¹²¹ Sedangkan menurut pemilik meubel lain yaitu meubel nadia alasan yang sering dikemukakan oleh pembeli dalam melakukan penundaan pembayaran seperti belum gaji, ada keperluan yang lain dan lain sebagainya.¹²² Pernyataan serupa juga muncul menurut pemilik meubel meyda dan meubel ananda, pemilik meubel meyda menjelaskan bahwa penyebab yang paling sering terjadi berdasarkan alasan pembeli ialah gaji belum masuk atau belum dapat uang. Ada juga yang uangnya terpakai untuk keperluan lain, bermacam-macam lah alasan pembeli.¹²³ Pemilik meubel ananda juga menuturkan bahwa alasan yang sering itu karena belum ada uang ataupun uangnya terpakai untuk keperluan lain, sehingga terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan.¹²⁴ Dari wawancara peneliti dengan pembeli pun, mereka menyebutkan alasan mereka menunda pembayaran karena adanya musibah, kebutuhan mendesak maupun permasalahan ekonomi. Sehingga mau tidak mau mereka harus menunda pembayaran barang pesanan.

¹²¹ AS, Wawancara.

¹²² K, Wawancara.

¹²³ S, Wawancara.

¹²⁴ N, Wawancara.

Berdasarkan analisis peneliti melalui penuturan dari masing-masing pemilik meubel dan hasil wawancara dengan pembeli, yang peneliti pahami bahwa penundaan pembayaran barang pesanan itu terjadi karena dua faktor, Yang pertama yaitu faktor Wanprestasi dan yang kedua yaitu faktor *Force Majeure*. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.¹²⁵ Sedangkan *Force Majeure* atau *Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- 3) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 4) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.¹²⁶

Ketidakmampuan pembeli melunasi pembayaran barang pesanan disini bisa saja karena ada kebutuhan mendesak diluar dari perhitungan pembeli seperti terkena musibah, sakit atau lain sebagainya yang mengharuskan pembeli mengeluarkan biaya tambahan atau kebutuhan

¹²⁵ Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*.

¹²⁶ Abdul kadir, *Hukum perdata Indonesia*.

tambahan. Bisa juga dikarenakan pembeli memiliki profesi pedagang atau profesi swasta lainnya yang memiliki penghasilan tidak tetap.

Penghasilan pembeli yang berprofesi seperti itu tidak selamanya sama, kadang hasil yang didapat tidak banyak dan itu sangat mempengaruhi pendapatannya, sehingga menyebabkan pembeli menunda pembayaran barang pesanan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati awal jual beli, meskipun terlambat satu hari saja hal ini bisa dikategorikan penundaan pembayaran.

Tindakan yang dilakukan oleh pembeli tentunya sudah melanggar kesepakatan atau akad jual beli yang sudah disepakati, seharusnya pihak pembeli wajib memenuhi hak dan kewajibannya sebagai tanggung jawab akibat dari perjanjian jual beli tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . .

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli bisa disebut hutang, yaitu hutang pembeli ke penjual. Tetapi dalam agama Islam apabila ada saudaranya yang kesusahan untuk membayar hutangnya, dan dia memudahkan urusan hutangnya. Sungguh beruntung sekali seseorang yang memberikan kemudahan bagi saudaranya yang berada dalam kesulitan itu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Tafsir dari ayat ini ialah Allah SWT menerangkan: Jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo, hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya bila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya. Allah SWT menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya.

Dari ayat ini dipahami juga bahwa:

- a. Perintah memberi sedekah kepada orang yang berutang, yang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang.
- c. Bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.¹²⁷

Selain firman Allah SWT tersebut, dalam beberapa hadits juga disebutkan mengenai keutamaan orang-orang yang memberi tangguhan

¹²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 429.

waktu bagi orang yang dalam keadaan kesusahan untuk melunasi hutangnya. Salah satunya ialah seperti yang dijelaskan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi,

. . . قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ . . .

“ . . . Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya." . . .”¹²⁸

Memberikan kemudahan kepada orang-orang yang lagi kesusahan membayar hutang juga selaras dengan salah satu kaidah dalam muamalah yang berbunyi,

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan”

Kaidah ini dijadikan oleh para fuqaha sebagai salah satu solusi dalam memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh umat Islam, itu menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu menginginkan kemudahan bagi manusia, karena semua hukum yang ada di ajaran Islam itu tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah.¹²⁹

Selain memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan untuk melunasi hutang, kita juga harus pula memberi kemudahan bagi orang yang mudah melunasi utang, karena kita akan mendapatkan keutamaan

¹²⁸ H.R. Muslim No. 2923

¹²⁹ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 54.

yang sama dengan orang yang memberikan tangguhan waktu dalam pelunasan hutang, sungguh beruntunglah orang yang demikian seperti itu.

Selanjutnya mengenai penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan apabila dihubungkan dengan teori etika bisnis Islam, dalam setiap melakukan jual beli hendaknya pembeli selalu menerapkan prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang dijadikan sebagai prinsip agar dijadikan sandaran bagi umatnya, di antaranya ialah:

- a. Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*).
- b. Membangun hubungan baik (*interrelationship*).
- c. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.
- d. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.¹³⁰

Dengan mengedepankan etika bisnis islam dalam jual beli, akan meminimalisir segala resiko yang bisa menyebabkan kerugian dalam jual beli dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan jual beli modern. Karena berdasarkan kaidah *fiqh* yang berbunyi,

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu wajib dihilangkan”¹³¹

Kerugian-kerugian yang didapat karena disebabkan penundaan pembayaran barang pesanan ini dapat mendatangkan *mudharat* bagi kedua belah pihak dan berdasarkan kaidah itu tersebut kita wajib

¹³⁰ Nawatmi, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”.

¹³¹ Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyah*, 60.

menghilangkannya atau setidaknya meminimalisir agar tidak terjadi lagi penundaan pembayaran barang pesanan ini yang dapat menyebabkan adanya kerugian, itu bisa saja dilakukan apabila kita selalu mengedepankan prinsip-prinsip etika Islam dalam berbisnis.

Etika bisnis Islam juga mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan dari sikap serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga bisa menciptakan kemashalatan dan kesejahteraan umat.

2. Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya

Dalam sebuah praktik jual beli banyak hal-hal yang terjadi tanpa terduga oleh para pihak yang melaksanakan jual beli, sehingga dapat berdampak pada keuntungan ataupun kerugian terhadap jual beli. Salah satu hal yang tidak terduga dalam praktik jual beli adalah penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dalam hal ini menyebabkan penjual mendapat kerugian. Kerugian biasa terbagi dalam dua klasifikasi, yaitu kerugian *materiil* dan kerugian *immateriil*. Kerugian *materiil* ialah kerugian yang bisa dihitung atau dinominalkan, sedangkan kerugian *immateriil* ialah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak begitu saja langsung bisa dihitung.

Dampak yang ditimbulkan pembeli apabila melanggar aturan kesepakatan menyebabkan penjual mendapat kerugian, karena kesepakatan yang dibuat dalam hal pembayaran tidak dilaksanakan

pembeli disebabkan karena pada saat akad berlangsung secara tidak terduga pembeli melakukan penundaan pembayaran barang pesanan dengan alasan-alasan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian pada 4 (empat) meubel di Kota Palangka Raya, masing-masing para pemilik meubel menuturkan kerugian-kerugian yang mereka dapat. Pemilik meubel riadi menjelaskan *“Kerugian itu pasti ada, tetapi kami usahakan agar tidak mendapat kerugian yang lebih banyak.”*¹³² Sedangkan pemilik meubel nadia menuturkan *“Kerugian itu pasti ada, yang pasti kerugian waktu. Karena menyelesaikan meubel pesanan itu tidak sebentar, bisa berhari-hari yang menyebabkan tertundanya menyelesaikan meubel yang lain. Yang awalnya untung malah mendapat kerugian. Setelah itu kerugian dari sisi modal, untuk membuat barang meubel itu kan perlu bahan-bahan seperti kayu dan lain-lain belum lagi untuk upah tukang.”*¹³³

Responden selanjutnya yaitu selaku pemilik meubel ananda menjelaskan *“Setiap usaha jual beli ini pasti ada untung dan ruginya, apalagi usaha meubel ini bukan menjadi kebutuhan primer manusia. Jadi pasti dikesampingkan orang dulu untuk kebutuhan yang lebih utama. Tapi untuk kami yang berjualan pasti rugi, salah satunya rugi dalam hal modal karena perputaran uangnya tertahan.”*¹³⁴ Responden terakhir yaitu pemilik meubel meyda menjelaskan *“Kerugian yang didapat pasti ada, berjualan inikan modalnya berputar. Jadi kalau ada*

¹³² S, Wawancara.

¹³³ K, Wawancara.

¹³⁴ N, Wawancara.

pembeli yang melakukan penundaan pembayaran, terganggu karena mendapat kerugian. Seperti kerugian waktu, kerugian modal dan membuat barang pesanan yang lain juga terlambat.”¹³⁵

Berdasarkan analisis penulis melalui penuturan dari masing-masing pemilik meubel dan hasil observasi, peneliti pahami bahwa kerugian-kerugian yang didapat penjual akibat penundaan pembayaran barang pesanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian *materiil* dan kerugian *immateriil*. Kerugian *materiil* yang didapat pembeli akibat penundaan pembayaran pesanan ini ialah kerugian dalam hal modal dan bahan baku, karena penundaan pembayaran barang pesanan ini menyebabkan penjual terhambat untuk membeli barang-barang bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan meubel, penjual harus menunggu uang tersebut dan tidak dapat menerima modal langsung dan keuntungan setelah barang itu selesai dibuat karena pembeli melakukan penundaan pembayaran sehingga terganggu perputaran modal. Selanjutnya yaitu kerugian *immateriil*, kerugian *immateriil* yang didapat disini ialah kerugian waktu. Karena sudah meluangkan waktu untuk membuat barang pesanan pembeli sehingga menyebabkan terhambatnya membuat barang pesanan yang lain sehingga berimbas ke pesanan yang lainnya.

Namun dengan adanya kerugian yang didapat penjual akibat penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli, berdasarkan hasil penelitian ternyata hal itu tidak menjadi masalah penjual dalam hal

¹³⁵ S, Wawancara.

melakukan jual beli secara sistem pesanan lagi dan jual belinya itupun tetap sah karena kedua belah pihak tetap saling *ridha*.

Sebagaimana kaidah *Fiqh* yang berbunyi,

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *muyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹³⁶

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

Keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada *keridhaan* kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling *meridhai*, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang *keridhaannya*, maka akad tersebut bisa batal.^{137,,,}

¹³⁶ Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyah*, 127.

¹³⁷ Ibid.

Karena sebelumnya penjual sudah mengetahui dampak-dampak kerugian yang akan didapat apabila pembeli melakukan penundaan pembayaran barang pesanan. Jadi apabila penjual tetap melakukan jual beli secara pesanan berarti mereka sudah siap dengan segala resiko yang didapat akibat penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan oleh pembeli selanjutnya, semuanya itu dilakukan karena niat saling tolong-menolong sesama umat manusia dan demikian juga agar saling memberikan hal yang bermanfaat pada orang lain.

Sebagaimana kaidah *Fiqh* yang berbunyi,

يُكْتَبَرُ الْأَضَاءُ فِي وَ الْحِلِّ الْمَنَافِعِ فِي ضُلِّ الْأَ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilakukan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilakukan.”

Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi,

... وَتَعَاوُنًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنًا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut untuk menyuruh manusia agar saling tolong-menolong dalam hal perbuatan kebaikan dan takwa. Potongan surah al-Maidah ayat 2 di atas menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam

Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam.

Islam mengajarkan bahwa kemarahan dan kebencian itu mutlak hak diri setiap manusia, namun ajaran tersebut memberi kewajiban agar dengan adanya kemarahan dan kebencian tersebut tidak memicu perbuatan menganiaya ataupun menindas yang lainnya. Suatu hal yang tidak baik hendaklah tidak dibalas dengan hal yang tidak baik juga. Dalam hal ini, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan juga akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT.

3. Penyelesaian Kerugian Akibat Penundaan Pembayaran Barang Pesanan Pada Industri Meubel di Kota Palangka Raya Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dalam setiap perjanjian dalam bentuk apapun termasuk jual beli, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi wanprestasi dan dapat juga terjadinya *Force Majeure* jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati. Apabila dalam suatu perjanjian jual beli si pembeli tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila itu dilakukan dengan sengaja atau pun bisa juga dikatakan *Force Majeure* kalau ada

keadaan memaksa diluar kendali pihak pembeli. Menurut Subekti, wanprestasi adalah kealpaan atau kelalaian yang terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat melakukannya.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹³⁸

Kelalaian yang dilakukan pembeli meubel di Kota Palangka Raya yang menjadi subjek dalam penelitian ini berupa tidak dilakukannya pembayaran barang pesanan dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan. Dengan demikian yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual adalah melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat melakukannya, yang apabila disengaja bisa disebut dengan wanprestasi dan apabila penundaan itu terjadi karena diluar kemampuan pembeli itu disebut *Force Majeure*. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut membuat penjual mendapat kerugian, hal ini membuat terganggunya produksi karena sisa pembayaran barang pesanan tersebut akan digunakan untuk memproduksi meubel yang lain lagi dan untuk pengeluaran operasional.

¹³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), 50.

Dalam Islam apabila ada sengketa sangat menganjurkan penyelesaian sengketa yang terjadi melalui *Sulhu* (perdamaian), jika kedua belah pihak yang bersengketa sudah melakukan *Sulhu* (perdamaian) tetapi tidak ada hasil dan sengketa masih terjadi maka bisa dilakukan dengan jalan Arbitrase (*tahkim*) atau melalui proses peradilan (*al-qada*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*, *sulhu* (perdamaian) merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam jual beli *Istishna'*. Dengan melakukan perdamaian melalui musyawarah oleh para pihak akan menghasilkan keputusan yang *win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Allah SWT selalu menyuruh umatnya untuk bermusyawarah dalam hal apapun sebelum diputuskan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Imran ayat 159 yang berbunyi,

. . . وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ . . .

“ . . . dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah . . . ”

Tafsir dari potongan ayat tersebut ialah bahwa Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum Muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan

bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum Muslimin selain Allah.¹³⁹

Secara bahasa *Sulhu* berarti meredam pertikaian, sedangkan secara istilah berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa secara damai sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 126 yang artinya “*Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*”. Ada 3 (tiga) rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian (*Sulhu*) yaitu, ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian perdamaian tersebut.¹⁴⁰

Persoalan yang boleh didamaikan (*disulhu-kan*) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk persengketaan harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkut hak-hak Allah SWT tidak dapat didamaikan.¹⁴¹

Dilihat dari praktiknya, penundaan pembayaran barang pesanan yang terjadi dikarenakan pembeli menunda pembayaran sehingga tidak sesuai dengan yang disepakati awal jual beli, dimana pada saat barang

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 68.

¹⁴⁰ Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (Januari – Juni 2019), 3.

¹⁴¹ Ibid.

tersebut sudah selesai pembeli seharusnya melunasi pembayaran barang pesanan tersebut tetapi pada kenyataannya pembeli melakukan penundaan pembayaran. Apabila dilihat berdasarkan teori kesepakatan, permasalahan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian atau akad yang sudah disepakati. Pengingkaran atau kesalahan yang dibuat dalam perjanjian merupakan suatu perbuatan tercela. Dalam Islam, mengenai apa yang telah diperjanjikan dalam akad atau kesepakatan maka masing-masing pihak harus saling menghormati dan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, baik secara lisan maupun tulisan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”* ayat tersebut menyuruh umat manusia untuk memenuhi akad yang sudah dibuat.

Dan juga sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surah an-Nahl ayat 91 yang berbunyi,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹⁴²

Tafsir dari ayat ini ialah, semua ikatan perjanjian yang dibuat dengan kehendak sendiri, wajib dipenuhi baik perjanjian itu sesama kaum Muslimin ataupun terhadap orang di luar Islam. Allah SWT

¹⁴² An-Nahl, 16: 91.

melarang kaum Muslimin melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah SWT, karena dalam sumpah seperti itu, Allah SWT telah ditempatkan sebagai saksi. Allah SWT akan memberi pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianati sumpah itu. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala amal perbuatan manusia. Dialah yang mengetahui segala perjanjian yang mereka kuatkan dengan sumpah, dan mengetahui pula bagaimana mereka memenuhi janji dan sumpah itu.¹⁴³ Berdasarkan ayat diatas Allah SWT sangat menegaskan kepada orang yang beriman untuk mentaati dan memenuhi perjanjian yang sudah disepakati. Demikian juga dengan hal kesepakatan atau akad jual beli pada meubel di Kota palangka Raya yang dilakukan secara pesanan.

Berdasarkan hasil penelitian penundaan pembayaran pada meubel di Kota Palangka Raya yakni meubel ananda, meubel meyda, meubel riadi dan meubel nadia, dapat dipahami bahwa umumnya penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan karena dua faktor, yaitu faktor wanprestasi dan *force majeure*. Karena ketidakmampuan pembeli melunasi pembayaran barang pesanan disini bisa saja karena ada kebutuhan mendesak diluar dari perhitungan pembeli seperti terkena musibah, sakit atau lain sebagainya yang mengharuskan pembeli mengeluarkan biaya tambahan atau kebutuhan tambahan. Bisa juga

¹⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 5* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 379.

dikarenakan pembeli memiliki profesi pedagang atau profesi swasta lainnya yang memiliki penghasilan tidak tetap.

Penundaan pembayaran barang pesanan yang dilakukan pembeli pada meubel di Kota Palangka Raya menyebabkan penjual mendapat kerugian, kerugiannya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian *Materiil* dan Kerugian *Immateriil*. Kerugian *materiil* ialah kerugian dalam hal modal dan bahan baku, karena penundaan pembayaran barang pesanan ini menyebabkan penjual terhambat untuk membeli barang-barang bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan meubel, penjual harus menunggu uang tersebut dan tidak dapat menerima modal langsung dan keuntungan setelah barang itu selesai dibuat karena pembeli melakukan penundaan pembayaran sehingga terganggu perputaran modal. Sedangkan kerugian *Immateriil* ialah kerugian waktu, karena sudah meluangkan waktu untuk membuat barang pesanan pembeli sehingga menyebabkan terhambatnya membuat barang pesanan yang lain sehingga berimbas ke pesanan yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran pada meubel di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pembatalan sepihak dan tanggung resiko
- b. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) atau *iqalah* (Pembatalan atas kerelaan kedua belah pihak).

a. Pembatalan sepihak dan tanggung resiko

Dapat diketahui bahwa apabila pembeli melakukan penundaan pembayaran tetapi tidak ada kejelasan atau itikad baik dari pembeli selama waktu yang ditentukan oleh penjual, dalam penyelesaiannya penjual melakukan, yakni:

- Pembatalan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan uang muka tidak bisa diambil kembali sebagai ganti rugi.
- Barang pesanan yang sudah selesai tersebut dipasarkan kembali kepada orang lain.

Terkait pembatalan jual beli oleh penjual dikarenakan pembeli tidak ada itikad baik dalam melakukan kewajibannya, dalam Islam penjual dan pembeli harus menepati perjanjian yang dibuat, karena perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan proses jual beli tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 7 yang berbunyi,

... ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۖ . . .

“... Selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. . .”¹⁴⁴

Dari ayat diatas, dalam hal ini terkandung arti bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, maka pihak lain boleh

¹⁴⁴ at-Taubah, 9: 7.

melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan sudah ada juga bukti-bukti bahwa salah satu pihak itu telah melakukan perbuatan pengkhianatan terhadap perjanjian, maka perjanjian yang sudah diikat dan disepakati oleh kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat diketahui berdasarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 58 yang berbunyi,

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

*“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.*¹⁴⁵

Tafsir dari ayat tersebut ialah Jika kaum Muslimin merasa ada tanda-tanda pengkhianatan dari satu golongan yang mengadakan perjanjian, haruslah dikembalikan perjanjian itu kepada mereka dan hendaklah mereka berusaha untuk menghalangi terjadinya pengkhianatan itu, dengan jalan mengembalikan perjanjian itu secara jujur disertai peringatan bahwa setelah adanya pengkhianatan itu pihak kaum Muslimin tidak terikat lagi dengan janji apa pun dengan mereka. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, dan juga tidak membolehkan pengkhianatan secara mutlak.¹⁴⁶

¹⁴⁵ al-Anfal, 8: 58.

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 4* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), 20.

Pembatalan jual beli ini dilakukan penjual karena adanya penundaan pembayaran barang pesanan dan ketidakjelasan dalam pelunasan pembayaran barang pesanan yang dilakukan pembeli sehingga menyebabkan penjual mendapat kerugian. Maka jual beli tersebut termasuk jual beli *fasid* atau yang dapat dibatalkan dan termasuk juga *Bai' al-Majhul* (jual beli yang didalamnya terdapat unsur *gharar*) karena jual beli tersebut tidak adanya kejelasan dalam waktu pembayaran. Sehingga salah satu dari para pihak dapat membatalkan jual beli tersebut dan ini juga termasuk dari hak *khiyar* penjual untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli.

Terkait hangusnya uang muka akibat dari pembatalan akad jual beli oleh penjual yang dikarenakan tidak ada kabar atau tidak ada kejelasan dari pembeli untuk melunasi pembayaran barang pesanan tersebut, dalam Islam jual beli yang menggunakan DP atau uang muka untuk mengikat adanya akad disebut dengan jual beli *'urbun*. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan akad jual beli *'urbun* dan ulama dari kalangan Hambali membolehkan akad jual beli *'urbun*. Masing-masing dari ulama memiliki dasar sendiri-sendiri dalam menentukan hukum jual beli *'urbun* ini.

Para ulama hukum Islam kontemporer dan lembaga fiqih Islam OKI memilih pandangan *fuqaha* Hambali dan membenarkan

praktik '*urbun* sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW yang digunakan untuk melarang '*urbun* tidak *shahih* sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*.¹⁴⁷

Pandangan ulama kontemporer tersebut memiliki dua tujuan transaksi '*urbun*, yaitu: pertama, uang muka yang dimaksud sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, uang muka merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua, uang muka juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang telah disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan '*urbun*/uang muka yang dibayarkan.¹⁴⁸

Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 010 tahun 1438 H/2016 M. Tentang: hukum uang muka apabila batal jual beli. Hukum uang muka apabila batal jual beli menghasilkan 2 (dua) poin *Istinbath*, yaitu:

- Uang muka dalam jual beli hukumnya mubah.

¹⁴⁷ Anwar, *Hukum Perjanjian*, 348.

¹⁴⁸ Ibid, 349.

- Jika terjadi pembatalan transaksi oleh pembeli, lalu uang muka menjadi hak milik penjual atas kesepakatan bersama dengan tidak saling merugikan, hukumnya mubah.¹⁴⁹

Penjelasan hal yang terkait diatas juga selaras dengan salah satu kaidah *Fiqh* yang berbunyi,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kaidah *Fiqh* tersebut menjelaskan bahwa semua adat kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syarak muamalah merupakan hal yang bisa dijadikan dasar hukum,¹⁵⁰ karena terkait hangusnya uang muka akibat dari pembatalan akad jual beli oleh penjual yang dikarenakan tidak ada kabar atau tidak ada kejelasan dari pembeli untuk melunasi pembayaran barang pesanan merupakan salah satu cara penyelesaian yang sering dilakukan oleh penjual untuk menutupi kerugian yang didapat dan adil untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terkait hangusnya uang muka akibat pembatalan akad jual beli secara sepihak karena pembeli tidak ada kabar atau tidak ada kejelasan untuk melunasi pembayaran barang pesanan. Hal tersebut dibolehkan saja karena

¹⁴⁹ Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, No. 010 Tentang: Hukum Uang Muka Apabila Batal Jual Beli, Bandung: 1438 H. / 2016 M.

¹⁵⁰ Hidayatullah, *Qawaid Fiqiyah*, 66.

sebagai kompensasi ganti rugi akibat pembeli wanprestasi atau tidak memenuhi perjanjian.

- c. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) atau *iqalah* (Pembatalan atas kerelaan kedua belah pihak).

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya dilakukan secara musyawarah atau secara kekeluargaan. Namun apabila tidak ada itikad baik dari salah satu pihak atau pihak pembeli, maka konsekuensinya ditanggung sendiri, tetapi apabila dapat diselesaikan dengan cara perdamaian atau musyawarah maka hal tersebut lebih baik. Penyelesaian permasalahan jual beli secara musyawarah atau secara perdamaian tentunya sesuai dengan penyelesaian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) maupun fatwa DSN MUI dan sangat dianjurkan juga oleh agama Islam.

Dalam penyelesaiannya secara musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak menemukan titik temu, apabila pembeli masih menghendaki barang pesannya tersebut penjual akan memberikan waktu kepada pembeli untuk melunasi pembayaran barang pesanan tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak (*Rescheduling*). Dalam istilah hukum perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli disebut dengan *Addendum* atau perjanjian tambahan yang ada pada

perjanjian pokoknya. Tetapi apabila pembeli sudah merasa tidak menghendaki lagi barang pesannya, penjual dan pembeli dapat memutuskan perjanjian jual beli tersebut sehingga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak gugur dan menghapus akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut sehingga status dari kedua belah pihak kembali seperti sedia kala sebelum perjanjian jual beli tersebut dibuat. Uang muka yang diberikan pembeli kepada penjual pada saat awal perjanjian jual beli dibuat tidak bisa dikembalikan karena digunakan sebagai biaya pemutusan perjanjian dan biaya ganti kerugian. Dalam istilah hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak disebut dengan *Iqalah*.

Dalam agama Islam, apabila terjadi permasalahan dalam suatu perjanjian atau terhadap jual beli yang dilakukan oleh umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya juga dengan permasalahan penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya. Mengajukan umatnya untuk melakukan penyelesaian secara perdamaian, supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan yang baru antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli dan agar tetap menjaga hubungan silaturahmi antar umat manusia, karena tujuan dari perdamaian atau musyawarah adalah agar mendapat penyelesaian yang kedua belah pihak ikhlas dan ridho, agar tidak

terjadi perselisihan diantara umat manusia khususnya sesama umat Islam.

Sebagaimana kaidah *fiqh* yang berbunyi,

مَضَرَّةٌ فِيهِ يَكُونُ أَنْ إِلَّا الْحِلُّ شَيْءٍ إِلَّا فِي ضَلِّ الْأَ

“Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan, kecuali ada mudharat (bahaya) dalam pelaksanaannya.”

Berdasarkan penjelasan dan kaidah *fiqh* di atas, maka dapat penulis pahami bahwa penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan penyelesaian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan menurut fatwa DSN MUI No.6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*. Hal tersebut dikarenakan masih ada itikad baik dari sebagian pembeli yang melakukan penundaan pembayaran barang pesanan yang kedua belah menyelesaikan dengan cara bermusyawarah yang hasil penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan *rescheduling* atau *iqalah*. Penyelesaian permasalahan dengan jalan perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara para pihak yang berselisih maka permusuhan dapat diakhiri dan akan terhindar dari kehancuran tali silaturahmi umat Islam khususnya antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya dikarenakan oleh 2 (dua) faktor. Yaitu wanprestasi dan *force majeure*. Karena ketidakmampuan pembeli melunasi pembayaran barang pesanan disini bisa saja karena ada kebutuhan mendesak diluar dari perhitungan pembeli seperti terkena musibah, sakit atau lain sebagainya yang mengharuskan pembeli mengeluarkan biaya tambahan atau kebutuhan tambahan. Bisa juga menjadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran barang pesanan, dikarenakan pembeli memiliki profesi pedagang atau profesi swasta lainnya yang memiliki penghasilan tidak tetap.
2. Kerugian yang didapat penjual akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kerugian *materiil* dan kerugian *immateriil*. Kerugian *materiil* yang didapat pembeli akibat penundaan pembayaran pesanan ini ialah kerugian dalam hal modal dan bahan baku, karena penundaan

pembayaran barang pesanan ini menyebabkan penjual terhambat untuk membeli barang-barang bahan baku yang diperlukan dalam pembuatan meubel, penjual harus menunggu uang tersebut dan tidak dapat menerima modal langsung dan keuntungan setelah barang itu selesai dibuat karena pembeli melakukan penundaan pembayaran sehingga terganggu perputaran modal. Selanjutnya yaitu kerugian *immateriil*, kerugian *immateriil* yang didapat disini ialah kerugian waktu. Karena sudah meluangkan waktu untuk membuat barang pesanan pembeli sehingga menyebabkan terhambatnya membuat barang pesanan yang lain sehingga berimbas ke pesanan yang lainnya.

3. Penyelesaian kerugian akibat penundaan pembayaran barang pesanan pada industri meubel di Kota Palangka Raya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, yang pertama pembatalan sepihak dan tanggung resiko. Sedangkan yang kedua ialah *Rescheduling* (penjadwalan ulang) atau *iqalah* (Pembatalan atas kerelaan kedua belah pihak). Penyelesaian penundaan pembayaran barang pesanan tersebut sudah sesuai dengan penyelesaian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan menurut fatwa DSN MUI No.6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*. Hal tersebut dikarenakan masih ada itikad baik dari kedua belah pihak yang melakukan penundaan pembayaran barang pesanan dilakukan dengan cara bermusyawarah yaitu dengan melalui perdamaian. Penyelesaian permasalahan dengan jalan perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara para pihak yang

berselisih maka permusuhan dapat diakhiri dan akan terhindar dari kehancuran tali silaturahmi umat Islam khususnya antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual dan pembeli agar selalu mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi jual beli, karena dengan kejujuran akan mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan. Harus lebih memperhatikan tingkah laku dan etika dalam setiap melakukan transaksi jual beli sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.
2. Kedua belah pihak harus saling mengantisipasi permasalahan yang muncul, walaupun permasalahan tidak dapat diperkirakan. Agar tidak ada pihak yang mendapatkan kerugian dan kedua belah pihak dapat memenuhi kesepakatan jual beli yang sudah dibuat. Dan juga agar setiap melakukan akad perjanjian jual beli perlu disiapkan perjanjian tertulis, karena didalam praktek jual beli tersebut masih belum ada perjanjian tertulis, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang menjadi dasar pembeli untuk tidak melakukan penundaan pembayaran.
3. Apabila kemudian hari terjadi kembali penundaan pembayaran barang pesanan, agar selalu melakukan penyelesaian dengan jalan perdamaian yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia edisi VI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Dewi, Gemala. Wirdyaningsih. Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fuadi, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ihsan Ghufroon. & Shidiq Sapiudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqiyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Notowidagdo, Rohiman. *Ilmu Budaya Dasar berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nurhayati, Sri., Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visi Media, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah vol 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani, 2008.

TIM. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018.

_____. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yaya, Rizal., Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. *Akutansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba, 2009.

Yudha Hernoko, Agus. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia)*. Jakarta: Kencana, 2010.

B. Skripsi, Jurnal dan Tesis

Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1. Januari 2012.

Aprianto. "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah". *Journal Of Islamic Lariba*, Vol. 3, Issue 2. Juli-Desember 2017.

Hidayat, Syafi'i. "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi". Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

Muhajirin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan". Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2018.

Musa, Jumadil. "Hadis Nabi SAW Tentang Larangan Menunda Membayar Hutang". Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2016.

Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". *Fokus Ekonomi*. Vol. 9, No. 1. April 2010.

Nurhayati. “Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 1. Januari – Juni 2019.

Safitri, Yulia. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan dalam Jual Beli Istishna Studi Pada Toko Cahaya Aluminium di Kec.Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara”. Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2019.

Sartika, Dewi. “Pelaksanaan Bai’ Al-Istishna’ Terhadap Pemesan Teralis Pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi – UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013.

Yuliati, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo” . Skripsi--Raden Intan, Lampung, 2018.

C. Wawancara dan Observasi

K. *Observasi*. Palangka Raya, 12 Juli 2020.

K. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Juli 2020.

N. *Observasi*. Palangka Raya, 11 Juli 2020.

N. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

AS. *Observasi*. Palangka Raya, 12 Juli 2020.

AS. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Juli 2020.

S. *Observasi*. Palangka Raya, 11 Juli 2020.

S. *Wawancara*. Palangka Raya, 21 Juli 2020.

AA. *Wawancara*. Palangka Raya, 9 September 2020.

NW. *Wawancara*. Palangka Raya, 10 September 2020.

MS. *Wawancara*. Palangka Raya, 11 September 2020.

ST. *Wawancara*. Palangka Raya, 10 September 2020.

D. Peraturan dan Undang-Undang

DSN MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*’.

DSN MUI No.22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli *Istishna*’ Paralel.

Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam, No. 010 Tentang: Hukum Uang Muka Apabila Batal Jual Beli, Bandung: 1438 H. / 2016 M.

E. E-book

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.

_____. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.

_____. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 4*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.

_____. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 5*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.

_____. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 9*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.

F. Internet

Admin, “Hadis 36: Membantu Sesama Muslim”. Dalam <https://haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/hadits-36-membantu-sesa-ma-muslim/>. 11 Februari 2020.

Admin, “Portal Resmi Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>

Admin, “Portal Resmi Kota Palangka Raya”, dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis>

Arifin Badri, Muhammad. “Akad Istishna”, dalam <https://pengusahamuslim.com/1156-akad-istishna.html>. 8 April 2020.

Asahi, Fajri. “Pengertian Tanggung Jawab”, dalam <https://ppkn.co.id/tanggung-jawab-adalah/>. 10 Juni 2020.

Bahraen, Raehanul. “Bahaya Tidak Segera Membayar Hutang Padahal Mampu”, dalam <https://muslim.or.id/29942-bahaya-tidak-segera-membayar-hutang-padahal-mampu.html>. 12 Februari 2020.